

# **RENCANA KONTINJENSI**

## **MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI**

### **KOTA PADANG**



**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**Januari 2013**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL .....	4
PENDAHULUAN.....	5
LATAR BELAKANG.....	5
PENGERTIAN .....	6
TUJUAN.....	6
LANDASAN HUKUM.....	7
SIFAT RENCANA KONTINJENSI .....	7
RUANG LINGKUP .....	7
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI.....	8
JANGKA MASA RENCANA KONTINJENSI .....	8
AKTIVASI RENCANA KONTINJENSI.....	8
PEMUTAKHIRAN RENCANA KONTINJENSI .....	8
GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	9
GEOGRAFIS.....	9
ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN DEMOGRAFI.....	10
KONDISI TOPOGRAFI .....	11
IKLIM.....	11
POTENSI BENCANA.....	11
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	12
PENILAIAN RISIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN .....	13
PENILAIAN RISIKO.....	13
PENENTUAN KEJADIAN.....	14
PENGEMBANGAN SKENARIO .....	19
KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	26
PERENCANAAN SEKTORAL (SEKSI) .....	28

SEKSI MANAJEMEN DAN KOORDINASI (PENGELOLAAN POSKO) .....	29
SEKSI EVAKUASI DAN SAR .....	37
SEKSI KESEHATAN .....	43
SEKSI KOMUNIKASI, TRANSPORTASI DAN DISTRIBUSI .....	50
SEKSI PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA .....	56
SEKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR .....	61
REKAPITULASI KEBUTUHAN .....	70
RENCANA TINDAK LANJUT .....	71
PENUTUP... ..	73
LAMPIRAN .....	74
Lampiran 1. PARAMETER PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA .....	75
Lampiran 2. LOKASI POSKO LAPANGAN DAN RUMAH SAKIT DARURAT .....	76
Lampiran 3. STRUKTUR KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA .....	77
Lampiran 4. PROFIL INSTANSI KELOMPOK KERJA .....	<a href="#">778</a>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kota Padang .....	9
Gambar 2. Pusat Gempabumi Merusak Pulau Sumatera (PVMBG, 2004) .....	15
Gambar 3. Perkiraan Sumber Gempa yang Mungkin Terjadi di Masa Datang (EOS, Nanyang Technological University, 2011) .....	16

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan .....	10
Tabel 2. Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	10
Tabel 3. Penilaian Bahaya .....	14
Tabel 4. Kronologis Kejadian Gempa dan Tsunami .....	16
Tabel 5. Penentuan Kejadian Bencana Tsunami di Kota Padang .....	18
Tabel 6. Kecamatan yang Akan Terkena Dampak Gempa dan Tsunami .....	19
Tabel 7. Dampak Gempa dan Tsunami terhadap Penduduk Kota Padang .....	20
Tabel 8. Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Infrastruktur .....	22
Tabel 9. Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Sarana Pendidikan.....	22
Tabel 10. Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Sarana Kesehatan.....	23
Tabel 11. Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Pemerintahan .....	23
Tabel 12. Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Perekonomian.....	24
Tabel 13. Dampak Kerusakan Lingkungan .....	24
Tabel 14. Kegiatan Seksi Manajemen dan Koordinasi.....	30
Tabel 15. Kebutuhan Seksi Manajemen dan Koordinasi .....	32
Tabel 16. Kegiatan Seksi Evakuasi dan SAR .....	38
Tabel 17. Kegiatan Seksi Evakuasi dan SAR .....	40
Tabel 18. Kegiatan Seksi Kesehatan .....	45
Tabel 19. Kebutuhan Seksi Kesehatan.....	47
Tabel 20. Kegiatan Seksi Komunikasi, Transportasi dan Distribusi .....	51
Tabel 21. Kebutuhan Seksi Komunikasi, Transportasi dan Distribusi.....	53
Tabel 22. Kegiatan Seksi Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana .....	57
Tabel 23. Kebutuhan Seksi Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana .....	59
Tabel 24. Kegiatan Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	62
Tabel 25. Kebutuhan Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	67
Tabel 26. Rekapitulasi Kebutuhan.....	70
Tabel 27. Parameter Pengakhiran Status Darurat Bencana .....	75

# 1

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Perubahan paradigma penanggulangan bencana menghendaki keterlibatan aktif berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi hingga kalangan media. Untuk daerah-daerah rawan bencana terutama dengan dampak bencana yang luas diperlukan keterpaduan dan kerjasama solid dari segenap stakeholder tersebut.

Topografi Kota Padang yang sarat dengan potensi bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, badai, abrasi pantai, gempa dan tsunami menimbulkan dampak berbeda bagi lingkungan alam dan kondisi sosial kemasyarakatan. Pasca gempa dan tsunami Aceh 25 Desember 2004, kekhawatiran masyarakat akan terjadinya gempa dan tsunami di pesisir pantai barat Kota Padang semakin meningkat. Pada satu sisi kekhawatiran ini dinilai beralasan karena Kota Padang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Dari hasil digitasi diketahui bahwa panjang garis pantai Kota Padang mencapai 68.126 kilometer, artinya warga kota yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang garis pantai tersebut rentan terhadap bahaya tsunami. Setidaknya warga dari 8 kecamatan di Kota Padang akan merasakan implikasi langsung bencana tsunami. Di sisi lain fenomena kerawanan semestinya tidak menyebabkan warga dan pemerintah kota menjadi paranoia dan melakukan tindakan kontraproduktif.

Kalkulasi ilmiah yang dipublikasikan Majalah National Geographic Indonesia edisi I tahun 2005 menyebutkan bahwa kemungkinan bencana tsunami yang melanda Kota Padang dipicu oleh gempa dari megathrust Mentawai. Catatan sejarah juga memperlihatkan dua fakta tsunami yang pernah melanda daratan yang sekarang dinamakan Kota Padang pada tahun 1797 dan 1833. Meskipun kekhawatiran warga belum bisa dihilangkan sepenuhnya dan potensi bencana tak bisa diredakan, para praktisi kebencanaan dari berbagai lembaga tak berhenti menggagas aktivitas edukasi kepada masyarakat. Jika pada gempa 10 April 2005 sebagian warga kota mengalami kebingungan

dalam melakukan evakuasi, maka kondisi berbeda dirasakan pada gempa-gempa besar setelahnya. Edukasi masyarakat lebih dititikberatkan pada peringatan dini alami berupa getaran gempa itu sendiri. Bila gempa yang terjadi dirasakan kuat dan lama (lebih dari satu menit) maka warga kota harus segera mengevakuasi diri ke daerah ketinggian. Sedangkan informasi resmi dari pemerintah berfungsi sebagai konfirmasi atas keputusan yang diambil masyarakat.

Kontinuitas upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan segenap komponen di Kota Padang ditengarai belum akan mengurangi risiko ancaman tsunami mengingat sentralnya posisi dan fungsi Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian serta sosial tak hanya diramaikan oleh populasi warga namun juga dipadati beragam fasilitas publik dan sarana prasarana pemerintahan.

## PENGERTIAN

Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana kontinjensi lahir dari proses perencanaan kontinjensi. Proses perencanaan tersebut melibatkan sekelompok orang atau organisasi yang bekerja sama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan mensepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak. Rencana kontinjensi disusun dalam tingkat yang dibutuhkan. Perencanaan kontinjensi merupakan prasyarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat tersebut. Perencanaan kontinjensi akan membangun kapasitas sebuah organisasi dan harus menjadi dasar bagi rencana operasi tanggap darurat.

## TUJUAN

Dokumen rencana kontinjensi ini disusun bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana tsunami pada saat tanggap darurat bencana agar berlangsung cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengambil peran dalam penyusunan rencana kontinjensi, seperti yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 4 menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Padang
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

## SIFAT RENCANA KONTINJENSI

Dokumen rencana kontinjensi ancaman bencana tsunami yang diakibatkan oleh gempa bersifat :

- a. Partisipatif, disusun oleh multi sektor dan multi pihak.
- b. Dinamis dan selalu *up to date*

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana kontinjensi menghadapi bencana tsunami ini berdasarkan skenario kejadian tsunami yang disebabkan oleh gempa di zona subduksi (berdasarkan hasil penelitian Prof. Kerry Sieh, Earth Observatory of Singapore Nanyang Technological University dan DR. Danny Hilman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sehingga akan melanda 8 kecamatan yang terpapar langsung dan skenario dikembangkan dengan menghitung juga dampak gempa terhadap 3 kecamatan lainnya yang tidak terpapar oleh bencana tsunami.



## TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI

Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana terhadap skenario ancaman tsunami di Kota Padang berikut dampaknya sehingga pentingnya penyusunan rencana kontinjensi.
- b. Pengumpulan data dan updating data yang dilakukan oleh semua sektor yang terkait dalam penanganan bencana dan lintas administratif.
- c. Penyusunan draft dokumen rencana kontinjensi oleh instansi lintas sektor berdasarkan data-data yang dibutuhkan
- d. Verifikasi data dan Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
- e. Melengkapi data-data sumber daya yang tersedia untuk menyempurnakan proyeksi kebutuhan
- f. Rapat konsultasi dengan Pimpinan SKPD/Instansi/Lembaga terkait
- g. Proses formalisasi/legalisasi dengan melibatkan Biro Hukum
- h. Menjadi lembar daerah berupa lampiran Perwako

## JANGKA MASA RENCANA KONTINJENSI

Jangka masa rencana kontinjensi disepakati adalah selama **tiga (3) tahun**. Dimulai sejak disahkannya Rencana Kontinjensi menjadi dokumen daerah.

## AKTIVASI RENCANA KONTINJENSI

1. Jika bencana tsunami terjadi, maka rencana kontinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi setelah ada penetapan status darurat bencana tsunami oleh Walikota Padang dan telah ditetapkan serta diaktifasinya Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Kepala BPBD Kota Padang (ex officio Sekda Kota Padang). Rencana kontinjensi diaktivasi dalam rapat penyusunan rencana operasi yang dipimpin oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.
2. Sementara Tim Reaksi Cepat (SAR dan Tim Kaji Cepat langsung bekerja 4 jam setelah Peringatan Dini 4 dari BMKG yang menyatakan bahwa landaan tsunami telah berakhir atau keadaan telah dinyatakan aman oleh BPBD.
3. Jika laporan dari tim kaji cepat dan analisa sumber daya yang berpedoman pada rencana kontinjensi ini, ternyata kota Padang tidak mampu menangani bencana tsunami tersebut, maka Walikota Padang akan merekomendasikan kenaikan status dan skala bencana menjadi bencana Provinsi kepada Gubernur Sumatera Barat.

## PEMUTAKHIRAN RENCANA KONTINJENSI

Jika dalam masa tiga (3) tahun tidak terjadi bencana tsunami, maka rencana kontinjensi harus dikaji ulang dan dimutakhirkan data-datanya

# 2

## GAMBARAN UMUM WILAYAH

### GEOGRAFIS



Gambar 1. Peta Administratif Kota Padang

Secara geografis Kota Padang terletak pada posisi  $00^{\circ} 44' 00'' - 01^{\circ} 08' 35''$  Lintang Selatan serta  $100^{\circ} 05' 05'' - 100^{\circ} 34' 09''$  Bujur Timur, dengan luas daerah  $694,96 \text{ Km}^2$  (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980).

Wilayah Kota Padang terdiri atas daerah perbukitan dan dataran landai. Daerah perbukitan memiliki luas  $205.007 \text{ Km}^2$ . Sedangkan pantai Kota Padang memiliki  $68.126$  kilometer, di luar pulau-pulau kecil.

Selain di daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki  $19$  pulau dimana

yang terbesar adalah Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas  $38,6 \text{ km}^2$ , Pulau Toran di kecamatan Padang Selatan seluas  $25 \text{ km}^2$  dan Pulau Pisang Gadang seluas  $21,12 \text{ km}^2$  juga di Kecamatan Padang Selatan.

## ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN DEMOGRAFI

Secara administratif Kota Padang terdiri atas 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan batas administratif meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Adapun rincian keterangan mengenai data administratif 11 Kecamatan di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	
		Sebelum Otonomi	Setelah Otonomi
Bungus Teluk Kabung	Pasar Laban	13	6
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	7	7
Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	21	15
Padang Selatan	Mata Air	24	12
Padang Timur	Simpang Haru	27	10
Padang Barat	Purus	30	10
Padang Utara	Lolong Belanti	18	7
Nanggalo	Surau Gadang	7	6
Kuranji	Pasar Ambacang	9	9
Pauh	Pasar Baru	13	9
Koto Tengah	Lubuk Buaya	24	13
Padang		193	104

Sumber: BPS Kota Padang, 2010

Kondisi demografi dan kepadatan penduduk di Kota Padang secara rinci terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
Bungus Teluk Kabung	100,78	22.896	227
Lubuk Kilangan	85,99	48.850	568
Lubuk Begalung	30,91	106.432	3.443
Padang Selatan	10,03	57.718	5.755
Padang Timur	8,15	77.868	9.554
Padang Barat	7,00	45.380	6.483
Padang Utara	8,08	69.119	8.554
Nanggalo	8,07	57.275	7.097
Kuranji	57,41	126.729	2.207
Pauh	146,29	59.216	405
Koto Tengah	232,25	162.079	698
Padang	694,96	833.562	1.199

Sumber: BPS Kota Padang, 2010

## KONDISI TOPOGRAFI

Selain di daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 38,6 km<sup>2</sup>, Pulau Toran di kecamatan Padang Selatan seluas 25 km<sup>2</sup> dan Pulau Pisang Gadang seluas 21,12 km<sup>2</sup> juga di Kecamatan Padang Selatan.

Wilayah daratan Kota Padang yang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0-1853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan.

## IKLIM

Berdasarkan tipe iklim menurut klasifikasi Schimdt dan Fergusson, wilayah Sumatera Barat termasuk kota Padang mempunyai iklim tipe A, B, C dan D. Suhu rata-rata di pantai Barat berkisar antara 21°C – 38°C, pada daerah-daerah perbukitan berkisar antara 15°C – 33°C. Sedangkan pada daerah dataran di sebelah Timur Bukit Barisan mempunyai suhu antara 19°C – 34°C. Meskipun umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April – Agustus dan musim hujan jatuh pada bulan September – Maret namun di Pantai Barat masih sering terjadi hujan pada bulan-bulan di musim kemarau.

Hampir setiap tahun di Wilayah Sumatera Barat terjadi 2 (dua) puncak curah hujan maksimum yaitu pada bulan Maret dan Desember, curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni/Juli. Jumlah curah hujan rata-rata maksimum mencapai 4.000 mm/tahun terutama di wilayah pantai Barat. Sedangkan beberapa tempat di bagian Timur Sumatera Barat curah hujannya relatif kecil antara 1.500 – 3.000 mm/tahun.

## POTENSI BENCANA

Berdasarkan keadaan topografi, morfologi dan geologi, Kota Padang memiliki potensi bencana sebagai berikut:

1. Longsor
2. Banjir dan banjir bandang
3. Badai
4. Gempa
5. Tsunami

Pascagempa dan tsunami Aceh 2004, ancaman gempa dan tsunami menjadi perhatian utama segenap stakeholder di Kota Padang. Rangkaian gempa yang bermula pada Maret 2005 di Pulau Nias dengan kekuatan 8,5 SR diikuti dengan gempa 6,9 SR di sekitar Laut Mentawai pada April 2005; gempa 6,3 SR di sekitar Danau Singkarak pada Maret 2007; gempa 8,4 SR dan 7,9 SR di sekitar perairan Bengkulu dan Sumatera Barat pada 12 dan 13 September 2007; serta gempa 30 September 2009 yang berkekuatan 7,6 SR di lepas Pantai Sumatera dan berjarak sekitar 50 km barat laut Kota Padang, telah menimbulkan trauma bagi warga Sumatera Barat. Terlebih lagi dengan perkiraan para ahli seismologi tentang potensi gempa raksasa berikutnya (*giant earthquake*) di sekitar Mentawai.

Tingginya intensitas gempa yang terjadi di Kota Padang dan besarnya resiko yang dihadapi andaikan bencana tsunami terjadi, mensyaratkan penetapan **Rencana Kontijensi Menghadapi Tsunami** sebagai prioritas dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Secara empiris Pemerintah Kota/Kabupaten harus melaksanakan antisipasi utama ketika bencana terjadi.

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 dan 19 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pelaksana tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, maka Kota Padang telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD sesuai dengan yang termaktub dalam aturan yuridis formal di atas diharapkan dapat meminimalkan resiko bahaya yang ditimbulkan oleh bencana yang mungkin terjadi sehingga kenyamanan fisik dan psikis warga kota dapat terwujud.

# 3

## PENILAIAN RISIKO DAN PENENTUAN KEJADIAN

### PENILAIAN RISIKO

Adapun penilaian risiko didasari dengan penilaian ancaman dan probability, yaitu kemungkinan terjadinya bencana dan dampak kerugian/kerusakan ditimbulkan dengan asumsi skoring sebagai berikut :

#### 1. Skala Probalitas (P)

- Angka 5 : pasti ( hampir dipastikan 80 % - 99 %)
- Angka 4 : kemungkinan besar (60% - 80 %, terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
- Angka 3 : kemungkinan terjadi (40%-60 %, terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun)
- Angka 2 : kemungkinan kecil (20 %-40%, terjadi tahun depan atau sekali lebih dari 100 tahun )
- Angka 1 : kemungkinan sangat kecil (hingga 20 %)

#### 2. Dampak Kerugian yang Ditimbulkan (D) :

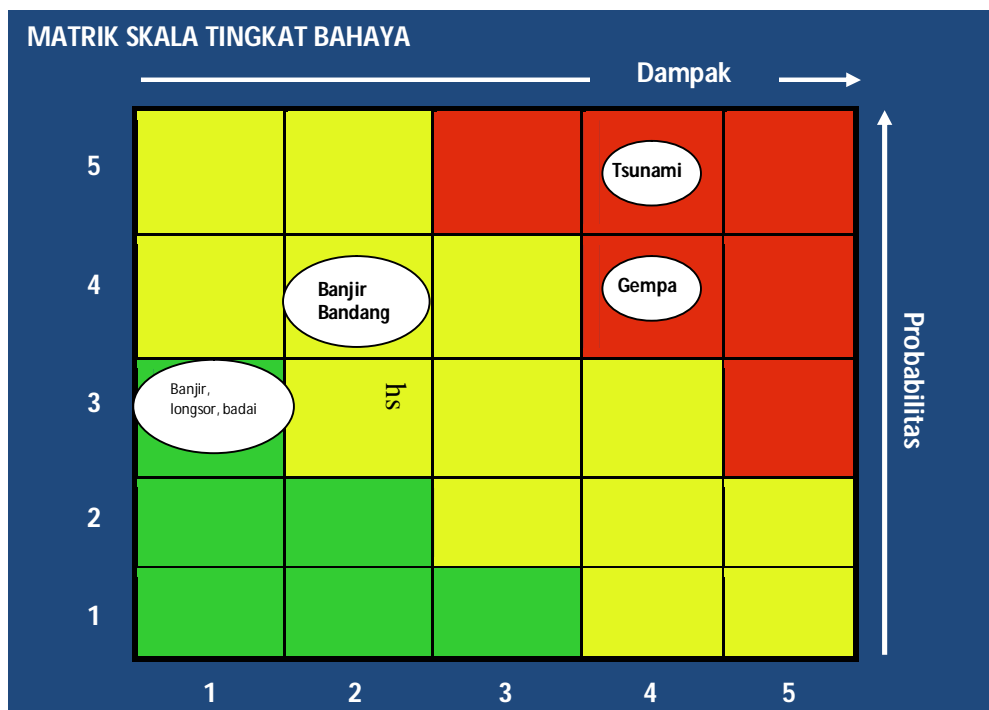
- Angka 5 : sangat parah ( 80 % - 99 %, wilayah hancur dan lumpuh total)
- Angka 4 : parah (60% - 80 %, hancur)
- Angka 3 : sedang (40%-60 %, wilayah terkena rusak)
- Angka 2 : ringan (20 %-40%, wilayah yang rusak )
- Angka 1 : sangat ringan (kurang dari 20 %, wilayah rusak)

Berdasarkan penilaian tingkat risiko tersebut, maka Kota Padang memiliki 6 jenis ancaman bencana, yaitu tsunami, gempa, banjir bandang, banjir, longsor dan badai, dengan tingkat bahaya sebagai berikut :

Tabel 3. Penilaian Bahaya

Jenis Ancaman Bahaya	Probability	Dampak
Tsunami	4	5
Gempa bumi	4	4
Banjir Bandang	4	2
Banjir	3	1
Longsor	3	1
Badai	3	1

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa Kota Padang mempunyai risiko yang tinggi untuk bencana tsunami, baik probabilitasnya maupun dampak yang ditimbulkannya dengan hasil perhitungan asumsi matrik kolom berwarna merah.



Dari matrik di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa rencana kontinjensi yang diperlukan di Kota Padang saat ini adalah **Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami (yang diakibatkan oleh gempa)**.

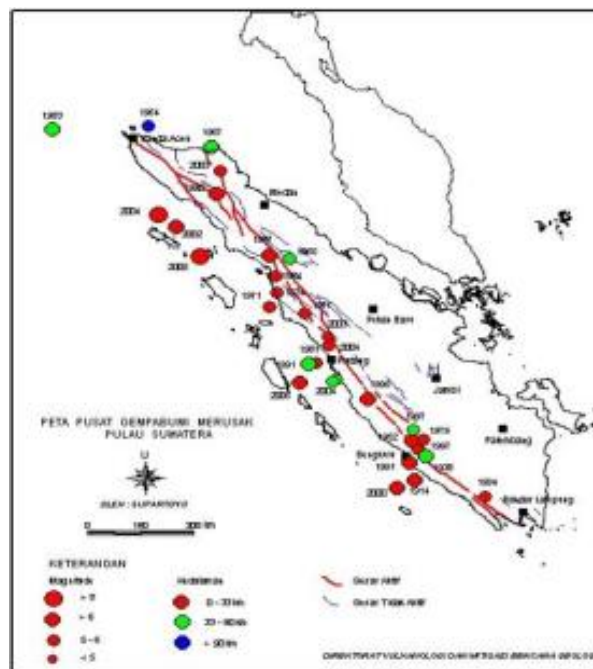
### PENENTUAN KEJADIAN

Berdasarkan penilaian risiko di atas dan banyaknya penelitian para ahli yang menyatakan bahwa tsunami mungkin sekali terjadi dalam waktu dekat dan akan berdampak pada sebagian besar masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di kawasan pesisir Sumatera Barat, maka Pemerintah Kota Padang menetapkan **tsunami** sebagai ancaman yang perlu diprioritaskan dalam penyusunan rencana kontinjensi menghadapi bencana. Rencana kontinjensi menghadapi bencana tsunami di kota Padang akan mengacu pada skenario yang telah ditetapkan oleh Provinsi melalui lampiran Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2012 Tentang

## Rencana Kontinjensi, Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat terletak di atas zona subduksi. Bagian dari zona subduksi itu bisa menyebabkan gempa yang besar mencakup sekitar 50-230 km dari pantai Barat pulau Sumatera, yaitu dari Padang hingga parit laut dimana *megathrust* Sunda mencapai dasar laut sehingga wilayah Sumatera Barat tergolong rawan gempa tektonik dengan intensitas relatif tinggi yang sangat berpotensi membangkitkan gelombang tsunami. Hal ini dimungkinkan karena di sepanjang lepas pantai Barat Kepulauan Mentawai terletak zona tumbukan (zona subduksi) antara Lempeng Samudera Hindia – Australia dan Lempeng Benua Eurasia yang sangat aktif. Zona tumbukan merupakan sumber gempa di laut berupa palung laut yang berada pada lokasi-lokasi yang membentang sekitar 50 – 230 km di sebelah Barat pulau Sumatera.

Gempa yang terjadi dapat berkekuatan besar, kedalaman dangkal, dan mekanisme sesar/patahan naik yang berpotensi membangkitkan terjadinya tsunami. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1797 dan 1833 di daerah yang sekarang dinamakan Sumatera Barat. Titik-titik gempabumi merusak yang terjadi di pulau Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Pusat Gempabumi Merusak Pulau Sumatera (PVMBG, 2004)

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh EOS *Nanyang Technological University* Singapura dan LIPI, perkiraan lokasi sumber gempa yang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat di masa yang akan datang dapat dilihat pada gambar 3.





**Gambar 3.** Perkiraan Sumber Gempa yang Mungkin Terjadi di Masa Datang (EOS, Nanyang Technological University, 2011)

Untuk kronologis penentuan kejadian dari tim ahli, digambarkan pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4.** Kronologis Kejadian Gempa dan Tsunami

NO	Item	Keterangan
1.	Kekuatan Gempa sebagai pemicu	8,8 SR
2.	Kedalaman	30 Km
3.	Jarak	150 Km barat daya kota Padang
4.	Gelombang tsunami 1	Mencapai pesisir kota Padang pada menit ke 20 , ketinggian 5-11 meter dari permukaan laut.
5.	Landaan tsunami	2 – 3 Km pada daratan rendah
6.	Durasi waktu	3-4 jam setelah gempa dengan 3 kali hantaman gelombang
7.	Dampak kejadian	Korban jiwa, korban luka, korban trauma dan hancurnya sarana prasarana di kota Padang

Sumber : Kerry Sieh, Danny Hilman, Jamie McCaughey, 2011

Berdasarkan skenario kejadian dari para ahli seperti tabel diatas, dapat diketahui bahwa tsunami dipicu oleh gempa dengan *magnitude* 8,8 SR, dengan kedalaman 30 km. Sumber gempa (*epicenter*) diperkirakan berjarak sekitar 150 km sebelah Barat Daya Kota Padang. Bisa dimana saja di bagian blok yang membentang sepanjang 50-200 km.

Gelombang tsunami pertama diperkirakan akan mencapai pantai kota Padang dalam waktu sekitar 20 menit setelah gempa dengan ketinggian 5-11 m meter dari permukaan laut. Landaan akan masuk ke daratan sejauh sejauh 2-3 km pada daerah dataran rendah dan lebih jauh lagi pada daerah aliran sungai, sedangkan pada dataran yang lebih tinggi, kurang dari jarak tersebut. Karena gelombang tsunami bukanlah gelombang tunggal, maka menurut pemodelan para ahli, akan terjadi tiga kali hantaman gelombang dalam waktu lebih dari 3 jam setelah gempa (Kerry Sieh, Jamie McCaughey dan Danny Hilman, 2011).

Fenomena ini berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat yang bermukim di daerah tepi pantai berikut sarana dan prasarana termasuk fasilitas umum Kota Padang akan mengalami risiko bencana lebih tinggi karena keadaan pantai yang landai dan topografi daratan yang datar-landai di sebelah Barat.

Skenario kejadian dengan kekuatan gempa 8,8 SR dan sumber gempa pada jarak 150 km Barat Daya kota Padang merupakan skenario terburuk menurut Kerry Sieh, Jamie McCaughey dan Danny Hilman. Maka untuk perencanaan penangana darurat, dalam skenario kontinjensi ini Pemerintah Kota Padang menambahkan kekuatan gempa menjadi 8,9 SR dan ketinggian tsunami menjadi 8-12 meter.

Sedangkan skenario waktu kejadian yang dipilih adalah hari paling sibuk (Senin) pada pukul 10.00 WIB. Skenario ini dianggap sebagai skenario berat karena anggota keluarga akan terpecah-pecah sesuai dengan aktivitas masing-masing. Skenario ini diharapkan masih mampu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Padang sesuai kapasitas termasuk sumber daya yang tersedia, walaupun ketika eskalasinya meningkat, dibutuhkan bantuan dari provinsi, nasional ataupun internasional.

Sementara skenario lainnya yang didiskusikan sebelum memilih skenario yang dipaparkan pada skenario penentuan kejadian ini adalah :

1. Skenario waktu kejadian: siang hari di saat hari libur dan semua anggota keluarga berkumpul di rumah (tidak terpecah-pecah) atau anggota keluarga berkumpul di lokasi yang sama, diasumsikan sebagai skenario ringan
2. Skenario waktu kejadian malam hari dan semua anggota keluarga berkumpul di rumah dianggap sebagai skenario sedang

Argumentasi yang mendasari pemilihan skenario kejadian ini adalah: bahwa jika keluarga terpecah-pecah akan menimbulkan kepanikan sehingga risiko korban lebih banyak dibandingkan dua (2) skenario yang disebutkan di atas, dimana anggota keluarga berkumpul di rumah atau di lokasi yang sama. Skenario yang telah dipilih dan disepakati ini diharapkan juga menjadi acuan dalam membuat rencana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami.

**Tabel 5.** Penentuan Kejadian Bencana Tsunami di Kota Padang

<b>NO</b>	<b>Item</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Asusmsi Waktu Kejadian	Hari Tersibuk (Senin) pukul 10.00 WIB
2.	Kekuatan Gempa sebagai pemicu	8,9 SR
3.	Kedalaman	30 Km
4.	Jarak	150 Km barat daya kota Padang
5.	Gelombang tsunami 1	Mencapai pesisir kota Padang pada menit ke 20 , ketinggian 5-11 meter dari permukaan laut.
6.	Landaan tsunami	2 – 3 Km pada daratan rendah
7.	Durasi waktu	3-4 jam setelah gempa dengan 3 kali hantaman gelombang
8.	Dampak kejadian	Korban jiwa, korban luka, korban trauma dan hancurnya sarana prasarana di kota Padang

# 4

## PENGEMBANGAN SKENARIO

Skenario mengenai aspek yang akan terkena dampak tsunami; penduduk, fasilitas kritis, fasilitas umum dan pemerintahan dikembangkan berdasarkan skenario kejadian tsunami seperti yang telah dipaparkan pada Bab 3, dimana tsunami dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR. Berdasarkan hal tersebut, maka 8 kecamatan (33 Kelurahan) di sepanjang pesisir kota Padang akan terkena dampak langsung tsunami, sementara 3 Kecamatan lainnya (4 kelurahan) juga akan terkena dampak gempa walaupun tidak terkena dampak tsunami. Jika bencana tsunami melanda, maka daerah-daerah yang terkena dampak gempa juga termasuk kepada daerah terdampak yang harus ditangani oleh pemerintah kota Padang. Daerah sepanjang pesisir kota Padang yang berisiko terhadap bencana gempa dan tsunami adalah :

**Tabel 6.** Kecamatan yang Akan Terkena Dampak Gempa dan Tsunami

No.	Kecamatan	Penduduk	Kelurahan	Keterangan
1.	Koto Tengah	192,250	6	Gempa dan tsunami
2.	Padang Utara	72,152	8	Gempa dan tsunami
3.	Padang Barat	57,911	6	Gempa dan tsunami
4.	Padang Selatan	69,581	4	Gempa dan tsunami
5.	Bungus Teluk Kabung	27,036	5	Gempa dan tsunami
6.	Lubuk Begalung	106,829	1	Gempa dan tsunami
7.	Padang Timur	84,604	2	Gempa dan tsunami
8.	Nanggalo	62,779	1	Gempa dan tsunami
9	Kuranji	144,864	2	Gempa
10	Pauh	57,977	1	Gempa
11	Lubuk Kilangan	54,717	1	Gempa
Total		<b>930,700</b>	<b>37</b>	

Sumber : Data Kelurahan Bersebelahan dengan laut (BPS Sumbar, 2011) dan hasil penghitungan kelompok kerja terhadap kelurahan yang terdampak gempa.

## 1. Penduduk

Dari data statistik kota Padang, penduduk yang terancam bencana tsunami meliputi wilayah 8 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dan juga memperhitungkan 3 kecamatan lainnya yang akan terkena dampak gempa sebagai pemicu terjadinya tsunami. Dampak bencana gempa dan tsunami terhadap penduduk kota Padang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Dampak Gempa dan Tsunami terhadap Penduduk Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Perkiraan Penambahan Penduduk di Siang Hari		Jumlah Penduduk di Siang Hari	Jiwa Terancam		Meninggal		Hilang		Pindah		Pengungsi		Keadaan Pengungsi							
			%	Jumlah		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Luka Ringan		Luka Sedang		Luka Berat		Non-Rawatan	
																		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Koto Tengah	192,250	10	27,921	220,171	60	132,103	30	39,631	10	13,210	1	1,321	59	77,941	9	7,015	10	7,794	40	31,176	41	31,956
2	Padang Utara	72,152	25	69,803	141,955	60	85,173	30	25,552	10	8,517	1	852	59	50,252	9	4,523	10	5,025	40	20,101	41	20,603
3	Padang Barat	57,911	25	69,803	127,714	60	76,628	30	22,988	10	7,663	1	766	59	45,211	9	4,069	10	4,521	40	18,084	41	18,536
4	Padang Selatan	69,581	20	55,842	125,423	60	75,254	30	22,576	10	7,525	1	753	59	44,400	9	3,996	10	4,440	40	17,760	41	18,204
5	Bungus Teluk Kabung	27,036		0	27,036	60	16,222	30	4,866	9	1,460	1	162	60	9,733	9	876	10	973	40	3,893	41	3,991
6	Lubuk Begalung	106,829		0	106,829	30	32,049	30	9,615	10	3,205	1	320	59	18,909	9	1,702	10	1,891	40	7,563	41	7,753
7	Padang Timur	84,604	10%	27,921	112,525	30%	33,758	30%	10,127	10%	3,376	1%	338	59%	19,917	9%	1,793	10%	1,992	40%	7,967	41%	8,166
8	Nanggalo	62,779		0	62,779	30	18,834	30	5,650	10	1,883	1	188	59	11,112	9	1,000	10	1,111	40	4,445	41	4,556
9	Kuranji	144,864		0	144,864	30	43,459	30	13,038	10	4,346	1	435	59	25,641	9	2,308	10	2,564	40	10,256	41	10,513
10	Pauh	57,977	10	27,921	85,898	30	25,769	30	7,731	10	2,577	1	258	59	15,204	9	1,368	10	1,520	40	6,082	41	6,234
11	Lubuk Kilangan	54,717		0	54,717	30	16,415	30	4,925	10	1,642	1	164	59	9,685	9	872	10	968	40	3,874	41	3,971
<b>JUMLAH</b>		<b>930,700</b>		<b>279,210</b>	<b>1,209,910</b>		<b>555,662</b>		<b>166,699</b>		<b>55,404</b>		<b>5,557</b>		<b>328,003</b>		<b>29,520</b>		<b>32,800</b>		<b>131,201</b>		<b>134,481</b>

Diolah berdasarkan data BPS tahun 2011 dan perhitungan Pokja

**Keterangan :**

- Perkiraan Penambahan Penduduk Kota Padang di Siang Hari adalah sebanyak 30% dari jumlah penduduk Kota Padang yaitu sebanyak 279.210 Orang
- Perkiraan total jumlah penduduk Kota Padang di siang hari adalah sebanyak 1.209.910 Jiwa
- Sebaran penambahan penduduk di masing-masing Kecamatan disesuaikan dengan aktifitas masyarakat di siang hari
- Komposisi non penduduk pada siang hari terdiri dari mahasiswa yang menetap, pedagang, pengunjung, pegawai kantor pelayanan publik dll
- Dari total pengungsi, diperkirakan :
  - 10% dari total pengungsi adalah balita = 32.800 Jiwa
  - 2% dari pengungsi adalah bayi = 6.560
  - 4,5% dari total pengungsi adalah lansia = 14.760
  - 2% dari pengungsi adalah ibu hamil = 6.560
  - 2,5% dari pengungsi adalah ibu menyusui = 8.200
  - 9% dari pengungsi adalah anak usia 10 - 14 tahun = 29.520 (14,760 laki-laki dan 14,760 perempuan)
  - 9,5% dari pengungsi adalah laki-laki dan perempuan berusia 15 - 19 tahun (15.892 laki-laki dan 15.269 perempuan)
  - 1,5% dari pengungsi adalah orang yang hidup dengan kecacatan = 4.920
  - 59% sisanya adalah penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif = 193.522 (96,761 laki-laki dan 96,761 perempuan)
- Asumsi jumlah penduduk meninggal, hilang, pindah, mengungsi dan luka-luka dihitung dengan mempertimbangkan :
  - peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan
  - faktor kerentanan berupa minimnya infrastruktur pendukung evakuasi jembatan-jembatan yang belum sepenuhnya diperbaiki setelah gempa 30 September 2009, bangunan-bangunan rumah dan gedung yang belum memenuhi konstruksi ramah gempa sampai kekuatan 9 SR, kemacetan pada jalan-jalan evakuasi dan masih sedikitnya gedung-gedung yang bisa digunakan sebagai tempat untuk evakuasi vertikal, kelompok rentan (termasuk sekolah-sekolah yang belum mempunyai rencana evakuasi) dan penambahan non penduduk
  - topografi wilayah kota Padang yang sebagian besar adalah datar-landai sehingga masyarakat harus menyelamatkan diri dengan cara berlari sejauh 3 km menjauhi pantai. Dan di beberapa bagian kelurahan, masyarakat tidak mempunyai jalan evakuasi menuju daerah aman dan sebagiannya harus menyusuri pantai terlebih dahulu.
- Diasumsikan delapan puluh persen (80%) korban meninggal akibat gempa juga menjadi korban meninggal akibat tsunami. Data ini sebagai komparasi bahwa asumsi penduduk terancam dan asumsi penduduk meninggal, luka dan mengungsi telah mempertimbangkan dampak dari gempa yang memicu tsunami dan landaan tsunami sejauh 2 km, sesuai dengan skenario kejadian yang telah disepakati.

Tentu saja skenario ini adalah asumsi untuk menggambarkan dampak yang akan dialami oleh penduduk sehingga pemerintah daerah bisa memproyeksikan kebutuhan sumber daya untuk penanganan darurat bencana dan juga bisa menjadi acuan untuk meminimalkan asumsi jumlah penduduk yang terkena dampak (meninggal dan luka-luka) melalui Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana lainnya.

## 2. Sarana Prasarana

Tsunami diperkirakan juga akan berdampak terhadap sebagian fasilitas atau prasarana serta aset yang berada di kota Padang. Berdasarkan inventarisasi sarana prasarana yang diperkirakan terkena dampak bencana gempa dan tsunami, dapat diketahui pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 8.** Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Infrastruktur

No	Jenis Kerusakan	Jumlah	Satuan	Terancam		Rusak						Gangguan Fungsi (Hari)
						Ringan		Sedang		Parah		
				%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	
1.	Jalan dan jembatan	21	ruas	100	21		0	40	8	60	13	7
2.	Jaringan irigasi	32	jaringan	100	32		0	40	13	60	19	30
3.	Jaringan listrik	1	jaringan	100	1		0		0	100	1	15
4.	Jaringan air bersih dan sanitasi	25	jaringan	100	25		0	40	10	60	15	15
5.	Depot bahan bakar minyak	1	unit	100	1		0		0	100	1	7
6.	Saluran komunikasi	1	unit	100	1		0		0	100	1	7
7.	Bandara	2	unit	100	2		0		0	100	2	7
8.	Pelabuhan	2	unit	100	2		0		0	100	2	7
9.	Sarana ibadah	617	unit	100	617		0	40	247	60	370	7

**Tabel 9.** Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Sarana Pendidikan

No	Jenis Kerusakan	Jumlah	Satuan	Terancam		Rusak						Gangguan Fungsi (hari)
						Ringan		Sedang		Berat		
				%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	
1	TK	226	Unit	60	136			40	54	60	81	30
2.	SD/MI	415	Unit	60	249			40	100	60	149	30
3.	SMP/ MTS	100	Unit	60	60			40	24	60	36	30
4.	SMA/ MA	58	Unit	60	35			40	14	60	21	30
5.	SMK	38	Unit	60	23			40	9	60	14	30
6.	KAMPUS	20	Unit	80	16			70	11	30	5	30

Tabel 10. Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Sarana Kesehatan

No	Jenis Kerusakan	Jumlah	Satuan	Terancam		Rusak						Gangguan Fungsi (hari)
						Ringan		Sedang		Parah		
				%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	
1.	Rumah sakit	27	Unit	75	20	0	0	60	12	40	8	0-2 jam setelah keadaan dinyatakan aman
2.	Puskesmas	22	Unit	50	11	0	0	70	8	30	3	
3.	Pustu	86	Unit	40	34	0	0	60	21	40	14	
4.	Poskeskel	11	Unit	60	7			60	4	40	3	
5.	Gudang farmasi	1	Unit	100	1				0	100	1	

### 3. Pemerintahan

Dampak bencana yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di kota Padang karena kerusakan gedung perkantoran dan sebagian pegawai pemerintah kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi korban atau anggota keluarganya menjadi korban seperti dijelaskan pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Pemerintahan

No	Jenis Kerusakan	Jumlah	Satuan	Terancam		Rusak						Gangguan Fungsi Pelayanan (Hari)
						Ringan		Sedang		Parah		
				%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	
1.	Kantor Walikota	1	unit	100	1	0	0		0	100	1	7
2.	Kantor SKPD	37	unit	100	37	0	0	40	15	60	22	7
3.	Kantor Camat	11	unit	64	7	0	0	40	3	60	4	7
4.	Kantor Lurah	104	unit	58	60	0	0	40	24	60	36	7
5.	Kantor TNI AD	18	unit	100	18	0	0		0	100	18	1
6.	Kantor POLRI	14	unit	100	14	0	0	100	14	40	6	1
7.	Kantor BASARNAS	1	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kantor TNI AL	3	unit	100	3	0	0	70	2	30	1	1
9.	Kantor TNI AU	1	unit	100	1	0	0		0	100	1	1
10.	Kantor PMI	3	unit	100	3	0	0	70	2	30	1	1
11.	Kantor PT. TELKOM	1	unit	100	1	0				100	1	1
12.	Kantor PLN	1	unit	100	1	0		100	1			1
13.	Kantor PDAM	1	unit	100	1	0		100	1			1
14.	Kantor Gubernur	1	unit	100	1	0	0	100	1		0	7
15.	Rumah dinas	50	unit	100	50	0	0	40	20	60	30	7
16.	Rumah dinas TNI	84	unit	100	84	0	0	40	34	60	50	7

### 4. Perekonomian

Dampak bencana tsunami yang dipicu oleh gempa juga akan berdampak terhadap kegiatan perekonomian kota Padang. Dampak terhadap perekonomian dapat dilihat pada Tabel 12.



Tabel 12. Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Perekonomian

No	Fasilitas Perekonomian	Jumlah	satuan	Terancam		Rusak					
				%	Unit	Ringan		Sedang		Parah	
						%	Unit	%	Unit	%	unit
1.	Pasar	17	bh	59	10	18	2	23	2	59	6
2.	Warung	3,426	bh	70	2,398	10	240	30	719	60	1,439
3.	Biduak/kapal	1,617	unit	100	1,617	-	-	-	-	100	1,617
4.	Industri kecil	4,868	unit	70	3,408	10	341	30	1,022	60	2,045
5.	TPI	4	unit	100	4	-	-	-	-	100	4
6.	Lahan Persawahan	13,889	ha	49	6,806	92	6,261	2	136	6	408
7.	Kolam ikan air tawar	95.7	ha	52	49.8	87	43.3	5	2.5	8	4
8.	Ternak ayam (mati)	5,741,898	ekor	50	2,870,949	-	-	-	-	100	2,870,949
9.	Ternak Sapi (mati)	26,495	ekor	50	13,248	-	-	-	-	100	13,248
10.	Perkebunan	3,378	ha	90	3,040	11	334	-	-	89	2,706
11.	Perbankan	81	unit	80	65	10	6	20	13	70	45
12.	Jasa transportasi	300	unit	80	240	-	-	-	-	100	240
13.	Koperasi	516	unit	80	413	-	-	30	124	70	289
14.	Hotel	67	unit	80	54	10	5	30	16	60	32

### 5. Lingkungan.

Dampak bencana juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada lingkungan pantai, terumbu karang, hutan bakau, persawahan dan obyek-obyek wisata pantai seperti dijelaskan pada tabel 13:

Tabel 13. Dampak Kerusakan Lingkungan

No	Lingkungan	Jumlah	Satuan	Terancam		Rusak		Tidak rusak	
				%	jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1.	Hutan	36,499	Ha	30	10,949.70	100	10,949.70	0	0.00
2.	Lingkungan Pantai	64	Km	100	64.00	100	64.00	0	0.00
3.	Lingkungan sawah	13,889	Ha	20	2,777.80	80	2,222.24	20	555.56
4.	Lingkungan Perkebunan	3,378	Ha	60	2,026.80	80	1,621.44	20	405.36
5.	Lingkungan Pemukiman	6,681	Ha	100	6,681.00	60	4,008.60	40	2672.40
6.	Sumber Air Bersih	6	lokasi	0	0.00	0	0.00	100	0.00
7.	Hutan Bakau/mangrove	120	Ha	100	120.00	100	120.00	0	0.00
8.	Muara Sungai	4	lokasi	100	4.00	100	4.00	0	0.00
9.	Objek Wisata Pantai	45	lokasi	100	45.00	100	45.00	0	0.00

Kerusakan lingkungan yang harus segera diantisipasi pada saat tanggap darurat bencana adalah terganggunya sumber air bersih dan lingkungan

pemukiman, sementara lainnya dipulihkan pada saat fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan skenario dampak seperti yang telah diuraikan sebelumnya, **maka diasumsikan waktu penanganan darurat/ tanggap darurat bencana dibutuhkan selama 90 hari** dan dapat dikaji lebih lanjut melalui rapat koordinasi awal dan evaluasi harian pada masa tanggap darurat bencana.

# 5

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam upaya penanganan darurat bencana, seluruh aspek terkena dampak perlu dipulihkan fungsinya dengan segera, sehingga kepulihan fungsi tersebut menjadi parameter untuk pengakhiran status darurat bencana (lihat lampiran 1). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun kebijakan dan strategi untuk mendorong lahirnya kegiatan-kegiatan yang mempercepat proses pemulihan darurat bencana (*early recovery*).

Adapun beberapa **Kebijakan** penting yang harus diambil serta **Strategi** yang dapat dilakukan dalam penanganan darurat bencana, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar korban serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanganan darurat bencana tsunami
  - a. Memobilisasi segenap kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada pemerintah kota (SKPD), TNI/POLRI, Swasta, Perguruan Tinggi, PMI, Relawan dan LSM.
  - b. Selain mengoptimalkan fungsi posko utama dan juga lebih mengoptimalkan posko lapangan sebagai lalu lintas pemberian bantuan dengan tujuan untuk menghindari duplikasi atau keterabaian
  - c. Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan) kepada korban.
  - d. Keluar masuk informasi atau data harus melalui satu pintu, yaitu dari posko utama.
  - e. Membuat nota kesepahaman dengan pihak swasta dan BUMN terkait penerahan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Seperti: adanya SPBU khusus untuk pelaku tanggap darurat bencana, penerahan alat berat dan disertai aturan tertulis mengenai tata layanan.

- f. Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana.
  - g. Menerima bantuan kepada dunia internasional sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
  - h. Membuat kesepakatan tertulis/konsensus antar SKPD untuk menjadikan rencana kontinjensi menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana.
  - i. Memprioritaskan lansia, ibu hamil, anak-anak dan masyarakat yang berkebutuhan khusus (Kelompok rentan)
  - j. Memberikan pelayanan keamanan kepada lembaga pemberi bantuan agar selamat sampai tujuan (lokasi bencana).
  - k. Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi terhadap setiap kegiatan penanganan darurat.
2. Mengkoordinasikan kegiatan (adanya manajemen koordinasi) penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh semua pihak terkait, baik lembaga/instansi pemerintah, swasta, LSM/NGO dan relawan.
- a. Mengaktifkan sistem komando dan kendali tanggap darurat bencana
  - b. Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi, baik tingkat lokal, nasional dan internasional
  - c. Mengerahkan relawan sesuai keahlian yang dibutuhkan pada saat penanganan darurat dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku

# 6

## PERENCANAAN SEKTORAL (SEKSI)

Pada bab perencanaan sektor ini diuraikan pembagian sektor yang berpedoman kepada Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana edisi Kedua yang diterbitkan BNPB pada tahun 2011 yaitu tentang jumlah dan nomenklaturnya ditentukan oleh para pelaku penyusunan rencana kontinjensi. Sektor-sektor ini menjadi komponen pendukung pada Bidang Operasi (Perka BNPB no. 10 tahun 2008). Untuk menghadapi bencana tsunami di kota Padang, sektor ini mengikuti klaster-klaster yang sudah dibentuk pada rencana kontinjensi menghadapi bencana tsunami di tingkat provinsi. .

Karena kota Padang sudah memiliki Peraturan Walikota (Perwako) No. 25 Tahun 2011 tentang Protap Penanggulangan Bencana di kota Padang, maka Sektor dinamakan sebagai Seksi yang akan menyesuaikan dengan Struktur Organisasi Tanggap Darurat yang ada. Seksi ini terdiri dari lembaga yang berada pada bidang kerja sektor yang sama.

Pada masing-masing seksi diuraikan tentang sasaran dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas/Lembaga/Instansi terkait penanggulangan bencana sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh masing-masing seksi beserta kebutuhan sumber daya yang akan dimobilisasi. Maka berdasarkan dampak bencana yang akan timbul, asumsi untuk kegiatan seksi pada saat tanggap darurat bencana mengacu pada perkiraan masa tanggap darurat yaitu 90 hari (3 bulan).

Berikut merupakan rincian 6 (enam) seksi beserta sasaran dan kegiatan masing-masing untuk menghadapi bencana tsunami di kota Padang

1. Seksi Manajemen dan Koordinasi (pengelolaan posko)
2. Seksi Evakuasi dan SAR
3. Seksi Kesehatan (termasuk sanitasi)
4. Seksi Transportasi, Komunikasi dan Distribusi
5. Seksi Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana

## 6. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pada saat operasi tanggap darurat bencana berlangsung, seksi-seksi tersebut dikendalikan oleh Kepala Bidang masing-masing.

### **SEKSI MANAJEMEN DAN KOORDINASI (PENGELOLAAN POSKO) KOORDINATOR : BPBD DAN DAMKAR KOTA PADANG**

#### **A. SITUASI**

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR, landaan tsunami akan masuk 2-3 km ke daratan kota Padang. Maka situasi yang akan dihadapi oleh Sektor Manajemen dan Koordinasi adalah :

- Aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak berfungsi
- Bangunan perkantoran dan sarana prasarana rusak berat,
- Korban bencana membutuhkan bantuan
- Akan banyak lembaga pemberi bantuan masuk ke kota Padang
- Pusat krisis tetap bisa difungsikan karena BPBD Kota Padang berada di zona aman

Maka, setelah Walikota menetapkan status darurat bencana skala kota Padang, sektor manajemen dan koordinasi harus menjalankan fungsinya untuk memastikan Struktur Komando Tanggap Darurat berjalan sebagaimana mestinya dengan memberi masukan kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

Tetapi jika ternyata berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan dan berpedoman pada rencana kontinjensi yang telah disepakati, Pemerintah Kota Padang tidak mampu menangani keadaan darurat bencana dengan sumber daya yang tersedia, maka Walikota akan mengajukan peningkatan status darurat bencana menjadi status darurat provinsi. Walaupun begitu, sektor Manajemen dan Koordinasi tetap akan menjalankan fungsinya karena Posko Tanggap Darurat Bencana kota Padang akan menjalankan fungsi sebagai Posko Lapangan.

#### **B. SASARAN**

1. Tersedianya tenaga operasional yang dapat dimobilisasi untuk penanganan bencana.
2. Terkoordinirnya kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing seksi.
3. Terkendalinya sistem pengamanan lingkungan di kawasan bencana dan di lokasi pengungsian.
4. Terinventarisasinya jumlah personil sarana dan prasarana, peralatan dan logistik lainnya yang dibutuhkan dan digunakan untuk penanganan darurat.
5. Terkoordinirnya seluruh bantuan untuk penanganan darurat yang ditujukan pada masing-masing seksi.

6. Tersedianya data mengenai jumlah korban, dampak kerusakan beserta jumlah kerugiannya, jenis dan jumlah kebutuhan serta laporan situasi yang selalu dimutakhirkan.
7. Tersedianya mekanisme dan aturan mengenai pengelolaan bantuan baik berupa tenaga manusia, dana ataupun peralatan.

### C. KEGIATAN

Pada klaster Manajemen dan Koordinasi kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Tabel 14. Kegiatan Seksi Manajemen dan Koordinasi

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Berakhir	Durasi Pelaksanaan
1.	Kajian Cepat	BPBD dan Damkar, TNI, POLRI, Satpol PP, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN, Basarnas Padang, Operator Telekomunikasi, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT	BPBD dan Damkar Kota Padang	1-6 Jam setelah bencana dan bisa dilanjutkan sesuai kebutuhan pelaksanaan tanggap darurat bencana, laporan pertama masuk maksimal 24 jam setelah terjadi bencana	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman dari landaan tsunami	1 hari
2.	Pendirian Posko Utama dan Posko Lapangan	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN, Dinas DAMKAR, KSB, SAR	BPBD dan Damkar Kota Padang	Maksimum 2x24 jam setelah terjadi bencana	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
3.	Memfasilitasi penyusunan rencana operasi dan menyiapkan tenaga operasional	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN, Dinas DAMKAR, SAR	BPBD dan Damkar Kota Padang	Maksimum 2x24 jam setelah terjadi bencana	pada saat masa tanggap darurat berakhir	2 hari

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Berakhir	Durasi Pelaksanaan
4.	Pengeralahan dan mobilisasi sumber daya	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN, Dinas DAMKAR, SAR, Kesbangpol	BPBD dan Damkar Kota Padang	segera setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
5.	Mengkordinasikan kegiatan masing-masing sektor	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN, Dinas DAMKAR	BPBD dan Damkar Kota Padang	segera setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
6.	Memberikan rekomendasi kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana mengenai perubahan strategi dan rencana operasi	BPBD dan Damkar Padang	BPBD dan Damkar Kota Padang	1x24 jam setelah operasi dilaksanakan/ berjalan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
7.	Membuat laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana secara menyeluruh	BPBD dan Damkar, TNI, POLRI, Satpol PP, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN, Dinas DAMKAR, Kecamatan	BPBD dan Damkar Kota Padang	1x24 jam setelah operasi dilaksanakan/ berjalan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari



#### D. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh seksi Manajemen dan Koordinasi, jumlah personel dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan jumlah biaya untuk sektor ini sebesar **Rp. 862.390.000** (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Proyeksi kebutuhan untuk sektor Manajemen dan Koordinasi dapat dilihat pada tabel 15

Tabel 15. Kebutuhan Seksi Manajemen dan Koordinasi

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JUMLAH KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1.	Posko Utama											
	Tenda Posko	1 unit/SKTD	1		1	12	BPBD dan DAMKAR	-	-	CUKUP (11)	10.000.000	-
	Tenda Pleton	1 unit/2 seksi	3		3	31	BPBD dan DAMKAR, KODIM	-	-	CUKUP (28)	9.000.000	-
2.	Posko Lapangan											
	Tenda Posko	1 unit/kec	11		11	11	KODIM, LANTAMAL, DINSOSNAKER KANTOR SAR, SATPOL PP, ORARI, RAPI	-		CUKUP	-	-
	Tenda Pleton	2 unit/kec	11		22	28	LANUD, LANTAMAL, POLRESTA, RSUD, SATPOL PP			CUKUP (6) - SAR	9.000.000	-

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JUMLAH KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3.	Kursi	20 /posko	12		240	240	BPBD dan DAMKAR, DINSOS, SATPOL PP, PMI, TNI, POLRI, KECAMATAN, KELURAHAN	-		CUKUP		-
4.	Komputer	1 /posko	12		12	57	BPBD dan DAMKAR, KECAMATAN			CUKUP (45)		
5.	Handy Talky	1 /posko	12		12	161	BPBD dan DAMKAR, LANUD, KODIM, LANTAMAL, DISHUB, PU, DKK, KANTOR SAR, ORARI, RAPI, PRAMUKA	-	Memfaatkan milik BPBD dan DAMKAR, milik dinas/ instansi/ lembaga lain untuk kebutuhan seksi selanjutnya	CUKUP (149)		
6.	Papan Data	3 /posko	12		36	36	BPBD DAN KECAMATAN	-		CUKUP		
7.	GPS	1 /posko	12		12	17	BPBD, TNI, POLRI, PMI	5		CUKUP		
8.	Kertas Milimeter	5 lbr/posko	12		60	-		(60)	beli	KURANG	100.000	(6.000.000)
9.	Kertas HVS	1 rim/posko/minggu	12	9	108	-		(108)	beli	KURANG	60.000	(6.480.000)

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JUMLAH KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
10.	Peta	1 lbr/posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR	-		CUKUP		
11.	Printer	1 unit/posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR, KECAMATAN	-		CUKUP		-
12.	Sound System	1 unit/posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR	-		CUKUP		
13.	Alat Penerangan	1 /posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR	-		CUKUP		
14.	Televisi	1 unit/posko utama	1		1	1	Sekretariat Daerah	-		CUKUP		
15.	Kamera Digital	1 unit/posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR	-		CUKUP		
16.	Handy Cam	1 unit/posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR	-		CUKUP		
17.	Sepatu Bot	10 pasang/posko	12		120	33	BPBD dan DAMKAR, KANTOR SAR	(87)		KURANG	50.000	(4.350.000)
18.	Dispenser	1 unit/posko	12		12	12	BPBD DAN KECAMATAN	-		CUKUP		
19.	Mobile Genset	1 unit/posko	12		12	12	BPBD DAN KECAMATAN	-		CUKUP		
20.	BBM Genset	5 liter/posko/hari	12	30	1.800	-		(1.800)	BELI	KURANG	4.500	(8.100.000)
21.	Mobil Operasional	1 unit/posko	12		12	12		-		CUKUP		-
22.	BBM Mobil Operasional	30 liter/minggu/posko	12	12	4.320	-		(4.320)	BELI	KURANG	4.500	(19.440.000)

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JUMLAH KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
23.	Sepeda Motor Operasional	1 unit/posko	12		12	218	BPBD dan DAMKAR, KODIM, LANTAMAL, POLRESTA, DISHUB, PU, KANTOR SAR, SATPOL PP			CUKUP (206)		-
24.	BBM Sepeda Motor Operasional	10 liter/posko/minggu	12	12	1.440	-		(1.440)	BELI	KURANG	4.500	(6.480.000)
25.	Telpon genggam	1 unit/posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR, DAN KECAMATAN	-		CUKUP		
26.	Telpon satelit	1 unit/posko utama	1		1	1	PMI	-		CUKUP	7.500.000	-
27.	Radio All Band	1 unit/posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR, KECAMATAN	-		CUKUP		-
28.	Mesin Fax	1 unit/posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR, KECAMATAN	-		CUKUP		
29.	Laptop	1 unit/posko	12		12	12	BPBD DAN KECAMATAN	-		CUKUP		
30.	Akses Internet	1 /posko	12		12	12	BPBD DAN KECAMATAN	-		CUKUP		
31.	Tikar	1 lembar/posko	12		12	12	BPBD DAN KECAMATAN	-		CUKUP		

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JUMLAH KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
32.	Rain coat/ponco	1 /posko	12		12	12	BPBD dan DAMKAR, DINSOSNAKER, KANTOR SAR	-		CUKUP		-
33.	Field Bed	5 unit/posko	12		60	135	BPBD dan DAMKAR, LANUD, LANTAMAL, KANTOR SAR			CUKUP(75)		
34.	Air Conditioner	1 unit/posko	12		12	12	BPBD DAN KECAMATAN	-		CUKUP		
35.	Kipas Angin	1 unit/posko	12		12	12	BPBD DAN KECAMATAN	-		CUKUP		
36.	Sarung Tangan	30 pasang/posko	12		360	360	DINAS SOSIAL, TNI, POLRI, PMI	-		CUKUP		
37.	Masker	30 buah/posko	12		360	360	DINAS SOSIAL, TNI, POLRI, PMI	-		CUKUP		
38.	Head Lamp	2 buah/posko	12		24	10	DINAS SOSIAL, TNI, POLRI, PMI, BASARNAS	(14)		KURANG	110.000	(1.540.000)
39.	Senter	2 buah/posko	12		24	24		-		CUKUP		
40.	Honor petugas posko	15 orang/posko/hari	12	90	16.200	-		(16.200)		KURANG	50.000	(810.000.000)
41.	MCK	1 unit/posko	12		12	-		(12)		KURANG		-
42.	Tangki Air Bersih	1 unit/posko	12		-	12	PDAM			CUKUP	50.000	-
<b>JUMLAH</b>												<b>(862.390.000)</b>

## **SEKSI EVAKUASI DAN SAR**

### **KOORDINATOR : BASARNAS – KANTOR SAR PADANG**

#### **A. SITUASI**

Apabila terjadi bencana tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR dengan kedalaman 30 KM dengan jarak 150 KM barat daya Kota Padang pada hari sibuk (Senin) pukul 10.00 pagi, maka akan terjadi situasi sebagai berikut :

1. Delapan (8) kecamatan akan terdampak gempa dan tsunami dan tiga (3) kecamatan lainnya akan terkena dampak gempa.
2. Setelah tsunami menghantam selama 3-4 jam, maka kota Padang akan tergenang selama 3-4 jam sampai gelombang surut kembali ke laut
3. Diasumsikan sebanyak 166.669 jiwa tidak mampu menyelamatkan diri / meninggal
4. Diasumsikan sebanyak 328.003 jiwa akan mengungsi dan membutuhkan pertolongan segera Sebanyak 32.800 pengungsi diperkirakan adalah balita, 6.560 pengungsi adalah bayi, 6.560 ibu hamil, 6.560 ibu menyusui, 4.760 lansia dan 3.280 mengalami kecacatan.
5. Diantara pengungsi tersebut; 131.201 jiwa akan mengalami luka berat, 23.800 jiwa mengalami luka sedang dan 29.250 jiwa mengalami luka ringan dan 134.481 jiwa mengungsi tanpa butuh rawatan
6. Sebagian dari pengungsi tersebut ada yang terperangkap dalam bangunan, menyelamatkan diri ke shelter-shelter yang ada dan sebagian lagi terpencar-pencar
7. Tim SAR baru akan bisa bekerja setelah keadaan dinyatakan aman dari bencana oleh Pusdalops BPBD dan Damkar Kota Padang
8. Jalan dan jembatan diperkirakan akan mengalami rusak parah, bangunan banyak yang roboh
9. Dalam waktu 2x24 jam akan berdatangan bantuan tim SAR baik dari nasional maupun internasional

Untuk mengantisipasi agar jumlah korban tidak bertambah, tim SAR segera melakukan pertolongan darurat di saat keadaan sudah dinyatakan aman oleh Pusdalops BPBD Damkar. Tim SAR Nasional dan Internasional akan bergabung di bawah kendali Koordinator Seksi Evakuasi dan SAR (Kepala Kantor SAR kota Padang).

#### **B. SASARAN**

1. Tersedianya jalur evakuasi
2. Tersedianya sarana transportasi.
3. Terlaksananya proses pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana, termasuk penyelenggaraan jenazah
4. Dilaksanakan pertolongan pertama segera kepada korban yang cedera.
5. Dilaksanakan prioritas pelayanan, perlindungan dan Evakuasi terhadap kelompok rentan (anak-anak, wanita Hamil, lansia dan kelompok berkebutuhan khusus) agar tidak bertambahnya korban.
6. Melaksanakan Identifikasi korban

### C. KEGIATAN

Pada seksi Evakuasi dan SAR, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

**Tabel 16.** Kegiatan Seksi Evakuasi dan SAR

NO.	KEGIATAN	PELAKU	PJ	WAKTU PELAKSANAAN		
				Mulai	Berakhir	Durasi Waktu
1	Mengumpulkan informasi	Seluruh anggota Tim kaji cepat SAR	Kantor SAR Padang	max 10 menit setelah keadaan dinyatakan aman	1 jam setelahnya	
2	Koordinator Seksi membagi zona/wilayah pencarian dan evakuasi korban	Koordinator Seksi Evakuasi dan SAR	Kantor SAR Padang	max 1 jam setelah keadaan dinyatakan aman	Hari ke 7	7 hari dan bisa diperpanjang sampai 14 hari
3	Menyediakan peralatan dan membuka jalur evakuasi untuk pencarian korban	BPBD dan Damkar, Dinas PU, TNI, POLRI, Dishub, Dinas Sosial, PMI, DKK, Satpol PP dan Linmas, RAPI, ORARI	Kantor SAR Padang dan BPBD dan Damkar		Hari ke 7	7 hari dan bisa diperpanjang sampai 14 hari
4	Memberikan pengarahan kepada Tim Pencari, Penolong, Evakuasi, pengamanan serta masyarakat pada saat melakukan operasi di zona pencarian korban	Koordinator Seksi Evakuasi dan SAR	Kantor SAR Padang		Hari ke 7	7 hari dan bisa diperpanjang sampai 14 hari
5	Melakukan pemilahan ( <i>triage</i> ) terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau Dokter RS dan pertolongan pertama di lokasi bencana	Kantor SAR Padang, DKK, TNI, POLRI, BPBD dan Damkar	Kantor SAR Padang dan DKK		Hari ke 14	14 hari
6	Melakukan pengamanan di zona operasi	Satpol PP dan Linmas, Polri dan TNI	Polri		selama operasi	

NO.	KEGIATAN	PELAKU	PJ	WAKTU PELAKSANAAN		
				Mulai	Berakhir	Durasi Waktu
7	Melakukan evakuasi dan penyelamatan terhadap korban cedera dan mengevakuasi ke tempat penampungan sementara.	BPBD dan Damkar, Dinas PU, TNI, POLRI, Dishub, Dinas Sosial, PMI, DKK, Satpol PP dan Linmas, RAPI, ORARI, potensi SAR yang ada pada perguruan tinggi dan LSM, Lembaga Internasional melalui UN-OSOCC	Kantor SAR Padang dan DKK		Hari ke 7	7 hari
8	Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil <i>triage</i>	DKK, PMI, TNI, POLRI, RSUP, RSUD	DKK		Hari ke 7	7 hari
9	Melakukan pendataan dan identifikasi korban yang hidup dan meninggal	Kantor SAR Padang, DKK, TNI, POLRI, BPBD dan Damkar	TNI-POLRI (DVI)	max 1 jam setelah keadaan dinyatakan aman	Hari ke 7	
10	Mengirim korban bencana yang cedera ke RS/Puskesmas/RS Lapangan yang sudah ditentukan	BPBD dan Damkar, TNI, POLRI, Dishub, PMI, DKK, Satpol PP dan Linmas, Lembaga Internasional melalui UN-OSOCC	DKK dan PMI		Hari ke 7	7 hari
11	Memberikan prioritas pelayanan dan pertolongan terhadap kelompok rentan dalam proses penyelamatan dan pertolongan korban bencana	Seluruh pelaku	Kantor SAR Padang, BPBD dan Damkar		Hari ke 7	7 hari
12	Pemakaman bagi korban yang meninggal	BPBD dan Damkar, Kantor SAR Padang, TNI, Polri, Dinas PU, DKK, Dinsosnaker, DKP, Tokoh adat/ tokoh masyarakat	DKP dan Dinas PU		1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	Hari ke7
13	Melaporkan hasil identifikasi dan seluruh proses pelaksanaan evakuasi kepada Posko	Seluruh pelaku melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Seksi Evakuasi dan SAR	Kantor SAR Padang	Hari ke 7		
14	Memberi informasi dan publikasikan data korban kepada yang membutuhkan.		BPBD dan Damkar	Hari ke7		



#### D. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh Seksi Evakuasi dan SAR, jumlah personel dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan jumlah biaya untuk sektor ini sebesar **Rp. 3.537.700.000,-** (Tiga Milyar, Lima Ratus Tiga Puluh Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Menurut prosedur operasi SAR, proses pencarian dan evakuasi korban biasanya dilakukan selama 7 hari setelah bencana terjadi dan bisa diperpanjang sesuai dengan situasi yang ditemui di lapangan. Maksimal dilaksanakan selama 14 hari, sesuai dengan batas kemampuan manusia bertahan hidup tanpa makanan.

Proyeksi kebutuhan untuk Seksi Evakuasi dan SAR dapat dilihat pada tabel 17.

**Tabel 17.** Kegiatan Seksi Evakuasi dan SAR

No	KEBUTUHAN	SATUAN	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESEN- JANGAN	RASIO	KET	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
<b>A.</b>	<b>ALAT UTAMA SAR</b>											
1.	Rescue Car	Unit	10	7 Hari	10	2	kantor SAR Padang dan BPBD & DAMKAR	-8	KURANG	Bantuan	1.500.000.000,00	-
2.	Pal Sar Darat	Set	10	7 Hari	10	3	kantor SAR Padang	-7	KURANG	Bantuan	350.000.000,00	-
3.	Atv heavy duty	Unit	10	7 Hari	10	1	kantor SAR Padang	-9	KURANG	Bantuan	350.000.000,00	-
4.	Truck angkut Personil	Unit	50	7 Hari	50	20	kantor SAR Padang, TNI/Polri/Pemda	-30	KURANG	Bantuan	350.000.000,00	-
5.	Ambulance Rescue	Unit	50	7 Hari	50	50	kantor SAR Padang / Rumah Sakit / Dinas Kesehatan	0		Bantuan	550.000.000,00	-

No	KEBUTUHAN	SATUAN	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	RASIO	KET	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
6.	Sepeda Motor Trail	Unit	50	7 Hari	50	20	kantor SAR Padang / BPBD & DAMKAR/ POLRI / TNI	-30	KURANG	Bantuan	25.000.000,00	-
7.	Rescue Box	Unit	5	7 Hari	5	3	kantor SAR	-2	KURANG	Bantuan	750.000.000,00	(1.500.000.000,00)
8.	Eskavator	Unit	20	7 Hari	20	20	Dinas PU dan Swasta	0		Bantuan	750.000.000,00	-
9.	Buldozer	Unit	20	7 Hari	20	20	Dinas PU dan Swasta	0		Bantuan	1.000.000.000,00	-
<b>B.</b>	<b>SARANA SAR ANGGKUTAN LAUT</b>											
1.	Rigid inflatable boat 9,0 m	Unit	10	7 Hari	10	3	kantor SAR / Pol AIR	-7	KURANG	Bantuan	750.000.000,00	-
2.	Rescue Boat kelas II (30s/d 40m)	Unit	3	7 Hari	3	1	kantor SAR	-2	KURANG	Bantuan	10.000.000.000,00	-
3.	Perahu Karet + mopel	Unit	50	7 Hari	50	15	kantor SAR / BPBD & DAMKAR / Pol AIR	-35	KURANG	Bantuan	125.000.000,00	-
<b>C.</b>	<b>PERALATAN PENDUKUNG UTAMA</b>											
1.	Montenering	Set	10	7 Hari	10	5	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-5	KURANG	Bantuan	350.000.000,00	-
2.	Palsar Medis / Emergency Kit / Responder	Unit	50	7 Hari	50	55	kantor SAR / Rumah Sakit / DinasKesehatan	0	CUKUP	Bantuan	100.000.000,00	-
3.	Peralatan Pendeteksi lokasi korban reruntuhan	Unit	10	7 Hari	10	2	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-8	KURANG	Bantuan	650.000.000,00	-
4.	Sound Detector	Unit	10	7 Hari	10	2	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-8	KURANG	Bantuan	650.000.000,00	-
5.	Telescopik dan perlengkapannya	Buah	10	7 Hari	10	2	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-8	KURANG	Bantuan	300.000.000,00	-

No	KEBUTUHAN	SATUAN	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESEN-JANGAN	RASIO	KET	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
6.	Solar cell Unit	Unit	10	7 Hari	10	2	kantor SAR	-8	KURANG	Bantuan	50.000.000,00	-
7.	Alkom versi handy talkie	Unit	50	7 Hari	50	25	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-25	KURANG	Bantuan	1.800.000,00	-
8.	Half Dome helmet+heat lamp	Unit	200	7 Hari	200	100	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-100	KURANG	Bantuan	3.000.000,00	-
9.	Safety Google	Unit	200	7 Hari	200	100	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-100	KURANG	Bantuan	250.000,00	-
10.	Shoes Boot	Pasang	1500	7 Hari	1500	500	kantor SAR / BPBD& DAMKAR / BPBD / PMI / TNI/ POLRI	-1000	KURANG	Beli	150.000,00	(150.000.000,00)
11.	Knee pad& elbow pad	Pasang	200	7 Hari	200	100	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-100	KURANG		300.000,00	(30.000.000,00)
12.	Binocular	Unit	30	7 Hari	30	12	kantor SAR/ PMI	-18	KURANG		1.500.000,00	(27.000.000,00)
13.	Kantong mayat	Buah		7 Hari				0		Bantuan	200.000,00	
14.	Half mask	Buah	200	7 Hari	200	100	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-100	KURANG		200.000,00	(20.000.000,00)
<b>D.</b>	<b>ALAT BANTU NAVIGASI SAR</b>											
1.	GPS	Buah	20	7 Hari	20	5	kantor SAR / BPBD& DAMKAR	-15	KURANG		7.500.000,00	(112.500.000,00)
<b>E.</b>	<b>POSKO</b>											
	Tenda Regu	Unit	7	7 Hari	7	7	kantor SAR / BPBD & DAMKAR / TNI / POLRI/ SATPOL PP					

No	KEBUTUHAN	SATUAN	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESEN-JANGAN	RASIO	KET	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
F.	TENAGA SAR	Orang	11	7 hari	5000	148	kantor SAR / BPBD & DAMKAR / TNI / POLRI / SATPOL PP/ PMI/ Pramuka	-4852	KURANG		50.000,00	(1.698.200.000,00)
<b>TOTAL</b>												<b>(3.537.700.000,00)</b>

## SEKSI KESEHATAN

**KOORDINATOR : DINAS KESEHATAN KOTA PADANG**

### A. SITUASI

Apabila gempa bumi dengan kekuatan 8,9 SR yang menimbulkan tsunami setinggi 4-12 meter melanda 8 kecamatan di kota Padang, pada jam sibuk pk. 10.00 WIB di hari kerja, maka diperkirakan situasi yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Diperkirakan sebanyak 166.699 jiwa tidak bisa menyelamatkan diri/meninggal dunia,
2. Diperkirakan dari sebanyak 328.003 jiwa pengungsi, yang akan mengalami korban luka ringan berjumlah 29.520 jiwa, luka sedang berjumlah 32,800 jiwa dan luka berat berjumlah 131.201 jiwa.
3. Dampak dari gempa bumi & tsunami mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan yang berimbas kepada kesehatan masyarakat berupa : perkembangbiakan nyamuk baik demam berdarah maupun malaria dan beberapa penyakit menular lain yang berpotensi wabah dan juga adanya kerusakan/ kehilangan tempat tinggal menyebabkan masyarakat harus tidur di tenda pengungsian berjumlah 328,003 jiwa. Selain hal tersebut di atas dapat juga menyebabkan trauma psikis bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Maka, tim kesehatan yang bergabung dalam seksi kesehatan harus bergerak cepat untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa lebih banyak dan memberikan pertolongan kepada korban luka ringan dengan segera agar dapat membantu korban lainnya di barak penampungan. Korban-korban luka berat perlu segera ditangani di rumah sakit yang masih berfungsi atau rumah sakit darurat. Begitu juga denganantisipasi wabah, akan dilakukan dengan menempatkan pasien dengan penyakit menular pada tempat penampungan khusus.

## **B. SASARAN**

1. Tersedianya sumber daya kesehatan dan relawan medis yang memadai secara kuantitas dan kualitas
2. Berfungsinya seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang ada (termasuk Rumah Sakit dan puskesmas), RS Darurat serta RS Lapangan
3. Tersedianya obat-obatan dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan
4. Teridentifikasinya jenazah yang ditemukan oleh Tim *Disaster Victim Identification* (DVI)
5. Terhindarnya pengungsi dan petugas dari ancaman penyakit akibat dampak bencana yang terjadi serta terpeliharanya kesehatan lingkungan dan sanitasi
6. Terjangkaunya sasaran pelayanan kesehatan ke daerah sulit
7. Antisipasi gangguan kesehatan jiwa/mental/psikologis masyarakat
8. Tersedianya data korban yang dapat dipertanggungjawabkan

## **C. STANDAR MINIMAL**

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi :
  - Pelayanan kesehatan dasar
  - Pelayanan kesehatan klinis
2. Pengendalian penyakit menular meliputi :
  - Pencegahan Umum
  - Pencegahan Campak
  - Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
  - Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
  - Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
  - HIV/AIDS
3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
  - Cedera
  - Kesehatan Reproduksi
  - Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan
  - Penyakit Kronis

## **D. KEGIATAN**

Kegiatan seksi kesehatan menjadi bagian penting dari proses penanganan darurat bencana terutama pertolongan bagi korban yang selamat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi ini antara lain:

Tabel 18. Kegiatan Seksi Kesehatan

NO	KEGIATAN	PELAKU	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN		
				Mulai	Berakhir	Durasi Waktu
1.	Terlibat dalam tim Kajian Cepat (Rapid Health Assesment) yang dikoordinir oleh Pusdalops BPBD	Tim Medis dan relawan medis dari DKK, TNI, POLRI, Rumah Sakit (RSUP, RSUD, RS. Swasta, RS Jiwa, RS Bersalin), PMI	DKK	1-6 Jam setelah keadaan dinyatakan aman. Dilakukan selama 24 jam dan bisa dilanjutkan sesuai kebutuhan pelaksanaan tanggap darurat bencana	1x24 jam setelah kajian cepat dijalankan. Laporan pertama masuk setelah max 30 jam setelah keadaan dinyatakan aman	1-2 hari
2.	Mendirikan Pos Kesehatan Lapangan	DKK, BPBD Damkar, Rumah Sakit, TNI, POLRI, RAPI, ORARI	DKK dan TNI AD	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke 3	3 hari
3.	Memfungsikan kembali RS dan Puskesmas yang masih bisa beroperasi	DKK, Rumah Sakit, TNI, POLRI, PMI, relawan medis	DKK	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	pada saat tanggap darurat berakhir	90 hari
4.	Melakukan triase di lapangan dan rumah sakit	DKK (DKK), BASARNAS, Rumah Sakit, TNI, POLRI, PMI, Forensik, relawan medis	DKK dan PMI	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-7	7
5.	Menempatkan tenaga kesehatan dan farmasi (relawan medis) pada pos kesehatan / rumah sakit / sesuai dengan kompetensi	DKK, Rumah Sakit, TNI, POLRI, PMI, LSM	DKK	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-90	90
6.	Re-inventarisasi dan analisis kebutuhan peralatan medis, bahan habis pakai, dan obat-obatan, serta semua sarana pelayanan kesehatan pasca-tsunami	DKK, Rumah Sakit (RS): RS Jiwa, RS Bersalin, Puskesmas, PMI, Farmasi	DKK	1-8 jam setelah tsunami setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-90	90
7.	Menyalurkan/mendistribusikan : peralatan medis, bahan habis pakai dan obat-obatan ke semua sarana pelayanan kesehatan	DKK (DKK), Rumah Sakit, TNI, POLRI, PMI, LSM	DKK	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-90	90

NO	KEGIATAN	PELAKU	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN		
				Mulai	Berakhir	Durasi Waktu
8.	Melakukan koordinasi dengan tim DVI Rumah Sakit/TNI/Polri dalam identifikasi korban	DKK, Rumah Sakit, TNI/POLRI	DKK, TNI/POLRI	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-90	90
9.	Melakukan surveilans epidemiologi, sanitasi dan penyuluhan kesehatan	DKK, PMI	DKK	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	hari ke-90	90
10.	Melakukan pelayanan kesehatan keliling	DKK, Rumah Sakit, Puskesmas, PMI	DKK	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	hari ke-90	90
11.	Melakukan trauma healing	DKK, Rumah Sakit, Relawan, PMI, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pendidikan	DKK	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	hari ke-90	90
12.	Mendokumentasikan rekam medis dan menyimpannya dengan baik	DKK, Rumah Sakit, PMI				
13.	Melaporkan data korban. Laporan diserahkan kepada Kepala Bidang Operasi dan Posko Utama	Koordinator Seksi	DKK	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	hari ke-90	90

#### E. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh seksi Kesehatan, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan jumlah biaya untuk seksi ini sebesar **Rp. 52.703.500.000,-** (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Proyeksi kebutuhan untuk seksi Kesehatan dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Kebutuhan Seksi Kesehatan

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	KESENJANGAN	RASIO	KET	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
<b>I</b>	<b>POSKO KESEHATAN</b>										
1.	Papan Data	1	100	-	100	0	-100	KURANG	Beli	Rp 350.000	Rp (35.000.000)
2.	RIG	1	100	-	100	1	-99	KURANG	Beli	Rp 1.000.000	Rp (99.000.000)
3.	ATK (1 pkt/ Pos @ Rp. 100.000)	1	100	-	100	0	-100	KURANG	Beli	Rp 100.000	Rp (10.000.000)
4.	BBM (1 pkt / Pos @ Rp. 5000.000)	1	100	-	100	0	-100	KURANG	Beli	Rp 5.000.000	Rp (500.000.000)
5.	Genset	1	50	-	50	2	-48	KURANG	Beli	Rp 10.000.000	Rp (480.000.000)
6.	Field Bed (20 bh/ Pos)	5	100	-	500	19	-481	KURANG	Beli	Rp 500.000	Rp (240.500.000)
7.	Alat Kesehatan	1	100	-	100	23	-77	KURANG	Beli	Rp 5.000.000	Rp (385.000.000)
8.	Bahan Habis Pakai	1	100	-	100	25	-75	KURANG	Beli	Rp 2.000.000	Rp (150.000.000)
9.	Obat-obatan	1	100	-	100	25	-75	KURANG	Beli	Rp 10.000.000	Rp (750.000.000)
<b>JUMLAH</b>											<b>Rp (2.649.500.000)</b>
<b>II</b>	<b>TENAGA</b>										
1.	Dokter (1 org/ Pos/ 50 pasien)	1	2624	-	2.624	557	-2.067	KURANG	-	-	-
2.	Paramedis (2 org/ Pos/ 3 shift/ 50 Pasien)	6	1246	-	7.476	1696	-5.780	KURANG	-	-	-
3.	Sanitarian (1 org/ Pos)	1	100	-	100	47	-53	KURANG	-	-	-
4.	Sopir Ambulance (1 org/Pos)	1	100	-	100	57	-43	KURANG	-	-	-
<b>JUMLAH</b>											<b>-</b>
<b>III</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN UMUM</b>										
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	5	100		500	0	-500	KURANG	-	Rp 250.000	Rp (125.000.000)
2	Pelayanan Kesehatan Klinis	5	100		500	0	-500	KURANG	-	Rp 250.000	Rp (125.000.000)
<b>JUMLAH</b>											<b>Rp (250.000.000)</b>



No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	KESENJANGAN	RASIO	KET	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
<b>IV</b>	<b>PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR</b>										
1.	Pencegahan Umum (Vitamin A)	2	100	-	200	0	-200	KURANG	-	Rp 100.000	Rp (20.000.000)
	Pengadaan Vitamin A (Kapsul)	1	33713		33.713	88.075	54.362	KURANG	Pusat	Rp -	Rp -
2.	Pencegahan Campak (Imunisasi)	2	100		200	0	-200	KURANG	-	Rp 100.000	Rp (20.000.000)
	Pengadaan Vaksin Campak (Vial)	1	249807		249.807	15.000	-234.807	KURANG	Pusat	Rp -	Rp -
3.	Kesiapsiagaan KLB										
	a. DBD	3	100		300	0	-300	KURANG	-	Rp 100.000	Rp (30.000.000)
	b. Diare	3	100		300	0	-300	KURANG	-	Rp 100.000	Rp (30.000.000)
	c. Malaria	3	100		300	0	-300	KURANG	-	Rp 100.000	Rp (30.000.000)
	d. Tetanus	3	100		300	0	-300	KURANG	-	Rp 100.000	Rp (30.000.000)
	e. Campak	3	100		300	0	-300		-	Rp 100.000	Rp (30.000.000)
4.	Deteksi Dini KLB, Penyelidikan & Tanggap Kewaspadaan Dini KLB										
	a. Penyelidikan Kasus	10	100		1.000	0	-1.000	KURANG	-	Rp 100.000	Rp (100.000.000)
	b. Fogging	1	100		100	0	-100	KURANG	-	Rp 1.140.000	Rp (114.000.000)
	c. Imunisasi Tetanus	1	1000		1.000	0	-1.000	KURANG	-	Rp 50.000	Rp (50.000.000)
	d. Pengadaan Vaksin Tetanus					2.000		CUKUP			
5.	Penyehatan Lingkungan										
	a. Kaporisasi (Kaporit)	1	49363		49.363	0	-49.363		Dinkes Prov		Rp -
	b. Penjernihan Air (Aqua Tab)	1	232477		232.477	0	-232.477		Dinkes Prov		Rp -
	c. Pengadaan WC (20 org/Jamban)	1	16400		16.400	0	-16.400			Rp 3.000.000	Rp (49.200.000.000)
	c. Air Bersih (20 ltr/ jiwa)	1	555662		555.662	0	-555.662		PDAM		Rp -

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	KESEN- JANGAN	RASIO	KET	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
<b>JUMLAH</b>											Rp (49.654.000.000)
<b>V</b>	<b>PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR</b>										
1.	Pendataan Korban Cedera	5	100		500	0	500	-500	-	Rp 100.000	Rp 50.000.000
2.	Pendataan Kesehatan Reproduksi	5	100		500	0	500	-500	-	Rp 100.000	Rp 50.000.000
3.	Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan	5	100		500	0	500	-500	-	Rp 100.000	Rp 50.000.000
<b>JUMLAH</b>											Rp 150.000.000
<b>TOTAL</b>											<b>Rp (52.743.500.000)</b>

## SEKSI KOMUNIKASI, TRANSPORTASI DAN DISTRIBUSI KOORDINATOR : DINAS PERHUBUNGAN

### A. SITUASI

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 8,9 SR maka gelombang akan melanda daratan sejauh 2-3 km dan ketinggian maksimum 12 meter dari permukaan laut, maka asumsi situasi yang akan dihadapi adalah :

- Lumpuh atau terputusnya ruas jalan penghubung antara kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman.
- Satu-satunya jalan yang bisa digunakan untuk mendatangkan bantuan adalah ruas jalan Padang – Solok.
- Transportasi udara dan laut juga akan mengalami gangguan fungsi selama 30 hari (1 bulan) karena rusaknya bandara dan pelabuhan.
- Jaringan informasi komunikasi akan mengalami gangguan karena putusnya arus listrik, telepon rumah mengalami putus jaringan sementara provider selular mengalami *traffic* yang sangat tinggi sehingga tidak bisa difungsikan.
- Sarana transportasi juga mengalami kerusakan sehingga beberapa diantaranya tidak bisa difungsikan

Untuk itu, perlu diupayakan perbaikan dan pengadaan sarana transportasi, informasi dan komunikasi agar kebutuhan selama masa penanganan darurat bencana bisa terpenuhi terutama untuk pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar. Maka disini lembaga/instansi yang berhubungan dengan sektor ini harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi

### B. SASARAN

1. Terpenuhinya kebutuhan alat komunikasi (telepon satelit, HT, dsb) untuk digunakan oleh seluruh unsur pimpinan tanggap darurat bencana hingga tim pelaksana kegiatan seluruh sektor serta berfungsinya jaringan komunikasi secara baik dan merata yang dapat menghubungkan antara provinsi dengan kab/kota dan pusat.
2. Tersedianya personil dan teknisi yang dapat menggunakan alat komunikasi pada masing-masing instansi/SKPD terkait penanggulangan bencana dan pada tiap sektor.
3. Tersedia dan berfungsinya *media centre* untuk penerimaan dan penyampaian informasi. Informasi harus bersifat satu pintu. Media centre ini ditempatkan pada Posko Tanggap Darurat Bencana
4. Terpenuhinya sarana prasarana transportasi (darat, laut dan udara) serta data yang lengkap, berupa alat angkut dan sarana angkut, jalan dan personil (pengemudi) yang dibutuhkan dalam kegiatan tanggap darurat bencana.

### C. STRATEGI

1. Putus atau tidak berfungsinya jalur transportasi darat Padang – Pariaman dan Padang – Pesisir Selatan, maka seluruh akses dialihkan ke jalur Padang – Solok.  
Untuk alternatif akses keluar masuk Padang – Pariaman adalah Pariaman, Padang Panjang – Solok - Padang
2. Pendaratan Helipad dan pendaratan darurat pesawat direncanakan pada daerah yang aman dari bencana tsunami, seperti Jalan Bypass yang aman dari tsunami.
3. Untuk daerah yang sulit dijangkau, karena akses jalan darat terputus, maka akses masuk dan keluar kota Padang menggunakan helikopter.
4. Apabila akses komunikasi terputus (jaringan dari provider) maka minimal harus disediakan
  - Lokasi Posko
  - Genset sebagai pengganti tenaga listrik
  - Radio komunikasi HF dan VHF untuk menerima dan mengirimkan informasi dari dan keluar.
  - Perangkat komunikasi lainnya untuk membantu agar lancar dalam komunikasi.

### D. KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi komunikasi, transportasi dan distribusi antara lain:

**Tabel 20.** Kegiatan Seksi Komunikasi, Transportasi dan Distribusi

No	KEGIATAN	PELAKU / PELAKSANA	PENANGGUNGJAWAB	WAKTU PELAKSANAAN		
				Mulai	Berakhir	Durasi Waktu
1.	Terlibat sebagai anggota tim kajian cepat yang dikoordinir oleh PUSDALOPS BPBD Kota Padang	BPBD Damkar kota Padang, Dishub kota Padang, Diskominfo, Dinas Sosial, PU, RAPI, ORARI, TNI, POLRI, BUMN/BUKMD, Swasta, media	BPBD Damkar Kota Padang	1-6 Jam setelah keadaan dinyatakan aman. Dilakukan selama 24 jam dan bisa dilanjutkan sesuai kebutuhan pelaksanaan tanggap darurat bencana	1x24 jam setelah kajian cepat dijalankan. Laporan pertama masuk setelah max 30 jam setelah keadaan dinyatakan aman	1-2 hari

No	KEGIATAN	PELAKU / PELAKSANA	PENANGGUNGJAWAB	WAKTU PELAKSANAAN		
				Mulai	Berakhir	Durasi Waktu
2.	Mendirikan pos seksi komunikasi, transportasi dan distribusi	BPBD Damkar kota Padang, Dishub kota Padang, Diskominfo, Dinas Sosial, PU, RAPI, ORARI, TNI, POLRI, Biro Umum, ESDM, Pertamina, TELKOM, Provider Seluler, Satpol PP dan Linmas, perwakilan media	Dishub dan Polri	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	1x24 jam	1 hari
3.	Mendata jenis dan jumlah kebutuhan transportasi, komunikasi dan distribusi yang akan digunakan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana.					
4.	Menyusun dan menetapkan call sign dan sandi komunikasi untuk semua tim sektor penanganan darurat bencana.	Diskominfo, Dishub, POLRI, BPBD Damkar	Diskominfo	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	1x24 jam	1 hari
5.	Menyiapkan personil, bhm, suku cadang dan teknisi yang ahli dalam penggunaan masing-masing jenis alat transportasi, informasi, komunikasi	Diskominfo, Dishub, RAPI ORARI, Organda, Biro Umum, Swasta, BUMN/BUMD, TNI, POLRI, BPBD dan Damkar, Pertamina, perwakilan media, LSM	DISHUB dan KOMINFO	2-4 jam setelah rencana operasi ditetapkan	1x24 jam	1 hari
6.	Menetapkan landasan pacu darurat untuk pesawat udara atau helipad	Dishub, TNI	DISHUB Kota Padang dan TNI AU		1x24 jam	1 hari
7.	Menyediakan titik-titik pendaratan helipad.	Dishub, TNI	DISHUB Kota Padang dan TNI AU		1x24 jam	1 hari
8.	Menyediakan sarana transportasi untuk seluruh kebutuhan penanganan darurat bencana	Dishub, Organda, TNI, POLRI, Satpol PP, Swasta, BUMN/BUMD, LSM	Dishub	2-4 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
9.	Menyiapkan data akurat yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.		KOMINFO		Hari ke 90	90 hari (selama masa tanggap

No	KEGIATAN	PELAKU / PELAKSANA	PENANGGUNGJAWAB	WAKTU PELAKSANAAN		
				Mulai	Berakhir	Durasi Waktu
						darurat)
10.	Mengatur lalu lintas transportasi darat, laut, udara.	Dishub, TNI, POLRI	DISHUB Kota Padang, TNI dan POLRI		Hari ke 90	90 hari (selama masa tanggap darurat)
11.	Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Bidang Operasi dan Posko Utama	Seluruh pelaku kepada koordinator seksi, koordinator seksi kepada koordinator bidang	Dishub		pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari

#### E. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh Seksi Komunikasi, Transportasi dan Distribusi, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan jumlah biaya untuk sektor ini sebesar **Rp. 614.125.000,-** (Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Proyeksi kebutuhan untuk Seksi Komunikasi, Transportasi dan Distribusi lebih detail dapat dilihat pada tabel 21.

**Tabel 21.** Kebutuhan Seksi Komunikasi, Transportasi dan Distribusi

No	KEBUTUHAN	STANDAR		VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1.	Media Center	1	unit	1	-	1	0		1				
2.	Kendaraan Roda 4	2	unit/kec	11	-	22	64	TNI/POLRI/ Dinas PU	0	-	CUKUP (42)		
3.	Kendaraan Roda 6	1	unit/kec	11	-	11	11	TNI/POLRI	0	-	CUKUP		
4.	Kendaraan Roda 2	1	unit/kec	11	-	11	206	TNI/POLRI	0	-	CUKUP (195)		

No	KEBUTUHAN	STANDAR		VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESEN- JANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
5.	Papan Data	4	unit/pos ko	12	-	48	48	BPBD dan Damkar, Dinas Sosial, Kominfo, Bagian Umum, Kecamatan, kelurahan	0		CUKUP (16)		
6.	HT	5	unit/pos ko	11	-	55	149	TNI/POLRI, ORARI, RAPI, Dishub, PU, Kantor SAR	0		CUKUP (94)		
7.	Radio RIG	1	unit/pos ko	12	-	12	26	BPBD dan Damkar, Kantor SAR Padang, ORARI, TNI AU, Dishub, RSUD, PMI, Pramuka	0	-	CUKUP (14)		
8.	Radio HF	1	unit	1	-	1	1	ORARI	0	-	CUKUP		
9.	Genset/Diesel	1	unit	1	-	1	1	Beli/ Pinjam	0	Bantuan/ Beli	KURANG	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
10.	Landasan pesawat pacu darurat	1	unit	1	-	1	0	ByPass	1	-			
11.	Helipad	1	unit	11	-	11	-	ByPass/ Bangunan dengan Helipad	-	-			
12.	BBM (Solar)	30	liter	11	90	29700	0		29700	Beli	KURANG	Rp 4.500	Rp 133.650.000

No	KEBUTUHAN	STANDAR		VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESEN- JANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
13.	BBM (Bensin Untuk Motor)	5	liter	11	90	4950	0		4950	Beli	KURANG	Rp 4.500	Rp 22.275.000
14.	BBM (Bensin)	30	liter	27	90	72900	0		72900	Beli	KURANG	Rp 4.500	Rp 328.050.000
15.	Televisi	1	unit	1	90	1	0		1	Beli	KURANG	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
16.	Sirine	1	unit	1	-	1	1	Beli	1	Beli	KURANG	Rp 150.000	Rp 150.000
17.	Repeater	2	unit	2	-	2	2	ORARI/RAPI/ BPBD dan Damkar	0	-	CUKUP		
18.	Camera	1	unit	1	-	1	1	BPBD dan Damkar	0	-	CUKUP		
19.	Telepon satelit	6	unit	6	-	6	0		6	Beli	KURANG	Rp 15.000.000	Rp 90.000.000
20.	Laptop/Notebook dan Fast Internet	2	unit	2	-	2	2	BPBD dan Damkar	0	-	CUKUP		
21.	Petugas Patwal (Mobil)	5	orang	5	-	5	5	POLRI	0	-	CUKUP	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
22.	Petugas Patwal (Motor)	5	orang	5	-	5	5	POLRI	0	-	CUKUP		
23.	Printer	1	unit	1	-	1	1	BPBD dan Damkar	0	-	CUKUP		
24.	Mobil Keliling	4	unit	4	-	4	4	TNI/POLRI, BPBD dan Damkar, Dishub	0	-	CUKUP		
25.	Helicopter	2	unit	2	-	2	0		2	Pinjam ke TNI AU	KURANG		
26.	Public Address (TOA)	10	unit	10	-	10	-						
<b>TOTAL</b>													<b>Rp 614.125.000</b>



**Catatan:**

No	Item	Standar
1	Kendaraan Roda 4	2 per kecamatan
2	Kendaraan Roda 6	1 per kecamatan
3	Kendaraan Roda 2	2 per kecamatan
4	HT	5 per kecamatan
5	Radio RIG	1 item per kecamatan
6	Radio HF	1 untuk posko pusat
7	Genset/Diesel	5 per kecamatan
8	Personil	20 per kecamatan
9	Landasan pesawat pacu darurat	1 untuk kota padang
10	Helipad	1 per kecamatan
12	BBM (Solar)	150 liter per hari
13	BBM (Bensin)	100 liter per hari

**SEKSI PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA  
KOORDINATOR : DINAS PU**

**A. SITUASI**

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR, dengan ketinggian gelombang 4-12 m, maka situasi yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

- Jalan dan jembatan yang menghubungkan kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang pariaman putus total
- Saluran komunikasi, jaringan listrik dan jaringan air bersih akan mengalami gangguan
- Dua bandara yang dimiliki kota Padang tidak bisa berfungsi karena mengalami kerusakan parah. Gangguan fungsi ini kemungkinan berlangsung selama 7 hari
- Sarana pendidikan mengalami kerusakan sebanyak 60% dari jumlah terancam (perkiraan sebanyak 306) gedung sekolah dan kampus tidak bisa difungsikan
- Kantor Pemerintahan, POLRI dan TNI juga mengalami dampak kerusakan 60-100 % dari jumlah terdampak sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya selama 7 hari
- Sarana kesehatan seperti Rumah Sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai pengobatan di daerah terdampak juga akan mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa beroperasi
- Rumah dinas dan rumah masyarakat juga tidak bisa ditinggali untuk sementara waktu
- Bahan Bakar Minyak akan mengalami keterbatasan stok

Maka, seksi pemulihan sarana dan prasarana harus melakukan langkah-langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi keadaan ini.

## B. SASARAN

1. Pulihnya fungsi fasilitas kritis dan fasilitas umum terkait dengan kebutuhan hajat hidup masyarakat termasuk tersedianya huntara
2. Pelayanan publik, pendidikan dan lembaga/instansi pemerintahan dapat kembali bisa dilaksanakan (tidak vakum).

## C. KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi perbaikan dan pemulihan sarana prasarana antara lain:

**Tabel 22.** Kegiatan Seksi Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Selesai	Durasi Pelaksanaan
1.	<b>Pemulihan fasilitas kritis dan layanan air bersih</b>					
	a. penempatan hidran umum	PDAM, TNI/ POLRI, PU	PDAM	4 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-5	5 hari
	b. penempatan water blader	PDAM, TNI/ POLRI, PU	PDAM	4 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-5	5 hari
	c. pendistribusian air bersih	PDAM, TNI/ POLRI, PU	PDAM	2 jam setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	90 hari
	d. perbaikan jaringan pipa air minum	PDAM, TNI/ POLRI, PU	PDAM	3 hari setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	87 hari
	e. perbaikan IPA	PDAM, TNI/ POLRI, PU	PDAM	7 hari setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	83 hari
2.	<b>Pemulihan fasilitas dan layanan sarana kesehatan</b>					
	a. pendirian pos kesehatan darurat	DKK, RSUD, TNI/POLRI, PMI	DKK	2 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-2	2 hari

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Selesai	Durasi Pelaksanaan
	b. pendirian posko UGD darurat	DKK, RSUD, TNI/POLRI, PMI	DKK	2 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-2	2 hari
	c. perbaikan gudang farmasi	DKK, RSUD, TNI/POLRI, PMI	DKK	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-2	2 hari
	d. perbaikan MCK	DKK, RSUD, TNI/POLRI, PMI, DIKNAS	DKK	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke-7	7 hari
3.	Pemulihan sarana penghubung transportasi (jalan & jembatan)					
4.	Pemulihan sarana dan layanan SPBU	PERTAMINA, TNI, POLRI, PU	PERTAMINA	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	90 hari
5.	Pemulihan sarana dan layanan pelabuhan	PELINDO, TNI/POLRI, DISHUB, PU	PELINDO	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	90 hari
6.	Pemulihan jaringan komunikasi	PROVIDER, TNI/POLRI, DISKOMINFO	DISKOMINFO	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	90 hari
7.	Pemulihan sarana listrik					
	a. perbaikan jaringan kabel listrik	PLN, TNI/POLRI	PLN	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	90 hari
	b. perbaikan gardu-gardu listrik	PLN, TNI/POLRI	PLN	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	90 hari
8.	Pembangunan pasar darurat	DINAS PASAR, TNI/POLRI, SATPOL PP, PU	DINAS PASAR	7 hari setelah rencana operasi ditetapkan	1 bulan	23 hari
9.	Penyediaan fasilitas hunian sementara	PU, BAPPEDA, TNI/POLRI	PU	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	2 bulan	60 hari
10.	Pemulihan gedung pemerintahan	PU, TNI/POLRI	PU	7 hari setelah rencana operasi ditetapkan	masa tanggap darurat berakhir	83 hari
11.	Pemulihan jalan dan jembatan	PU, TNI/POLRI	PU	1x24 jam setelah keadaan dinyatakan aman	masa tanggap darurat berakhir	90 hari
12.	Pemulihan gedung sekolah	DISDIK, PU, TNI/POLRI	Disdik, PU	7 hari setelah rencana	masa tanggap darurat	83 hari

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Selesai	Durasi Pelaksanaan
				operasi ditetapkan	berakhir	
13.	Pemulihan sarana ibadah	Kemenag, PU, TNI/POLRI	Kemenag	7 hari setelah rencana operasi ditetapkan	masa tanggap darurat berakhir	83 hari

#### D. STANDAR MINIMAL

1. 1 Tenda Rumah Sakit untuk 2500 orang
2. 1 Tenda Pengungsi untuk 25 orang
3. 1 Tenda Sekolah untuk 40 orang
4. 1 Tenda Dapur Umum untuk 100 orang
5. Sumber Listrik Genset
6. 1 MCK untuk 20 orang

#### E. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan kebutuhan biaya untuk seksi ini sebesar Rp. 107.755.730.000,- (Seratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Proyeksi kebutuhan untuk seksi Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana lebih detail dapat dilihat pada tabel 23.

**Tabel 23.** Kebutuhan Seksi Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana

No	KEBUTUHAN	STANDAR		VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1.	Hidran Umum/water blader	15	/kel	104	5	1560	0	PU, PDAM	1560	bantuan	KURANG	2.000.000,00	3.120.000.000,00
2.	Mobil tanki	3	unit/kel	104	90	312	4	PDAM	308	bantuan	KURANG	150.000.000,00	46.200.000.000,00

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESEJAN- GAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3.	Rehabilitasi IPA	1	8	83	8	0	PU, PDAM	8	bantuan	KURANG	7.000.000.000,00	56.000.000.000,00
4.	Perbaikan jaringan perpipaan			87	0		PDAM	0	bantuan			0,00
5.	Jerigen Air	280	104	90	29120	0	BPBD	29120	bantuan	KURANG	30.000,00	873.600.000,00
6.	IPA Portable	2	5	90	10	0	PDAM	10	bantuan	KURANG		0,00
7.	MCK	15	104	7	1560	0	PU, DKK, DKP	1560	bantuan	KURANG	1.000.000,00	1.560.000.000,00
8.	Tenda Posko Sarpras	1	11	2	11	11	DKK, PMI, RSUD, TNI, POLRI, BASARNAS, BPBD	0			25.000.000,00	0,00
9.	Meja, Kursi	5	11	2	55	55	PU, DISDIK	0			500.000,00	0,00
10.	Tandu	2	104	2	208	33	BPBD, PMI, DKK, RSUD, BASARNAS	175	bantuan	KURANG		0,00
11.	Panel Jembatan Bailey (m)			90			PU	0				0,00
12.	Excavator	1	6	90	6	2	PU	4	bantuan	KURANG	180.000,00/ jam	720.000,00
13.	Loader	1	6	90	6	0	PU	6	bantuan	KURANG	150.000,00/jam	900.000,00
14.	Dump Truck	1	6	90	6	0	PU	6	bantuan	KURANG	85.000,00/jam	510.000,00
15.	Crane dermaga	1	2	90	2	1	PELINDO	1	bantuan	KURANG		0,00
16.	Alat berat	3	2	90	6	0	PU	6	bantuan	KURANG		0,00
17.	Kapal tongkang	2	2	90	4	0	PELINDO	4	bantuan	KURANG		0,00
18.	Kayu papan	150	2	90	300	0	PU	300	bantuan	KURANG		0,00
19.	Tenda payung	100	2	90	200	0	PU	200	bantuan	KURANG		0,00
20.	Rumah knock down	50	2	60	100	0	PU	100	bantuan	KURANG		0,00
<b>Total</b>												<b>107.755.730.000,00</b>

## SEKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KOORDINATOR : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

### A. SITUASI

Apabila terjadi bencana tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR dengan kedalaman 30 KM dengan jarak 150 KM barat daya Kota Padang pada hari sibuk (Senin) pukul 10.00 pagi, maka akan terjadi situasi sebagai berikut :

- Delapan (8) kecamatan akan terdampak gempa dan tsunami dan tiga (3) kecamatan lainnya akan terkena dampak gempa.
- Diasumsikan sebanyak 328.003 jiwa akan mengungsi dan membutuhkan pertolongan segera berupa tempat penampungan darurat, makanan, minum dan pakaian.
- Sebanyak 32.800 pengungsi diperkirakan adalah balita, 6.560 pengungsi adalah bayi, 6.560 ibu hamil, 6.560 ibu menyusui, 4.760 lansia dan 3.280 mengalami kecacatan.
- Lembaga-lembaga pemberi bantuan akan berdatangan, mulai dari tingkat lokal, nasional dan internasional
- Untuk menampung bantuan yang datang, dibutuhkan gudang-gudang penyimpanan bantuan dan personil untuk menerima dan menyalurkan bantuan

Maka, seksi pemenuhan kebutuhan dasar harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, mengerahkan tenaga relawan, kendaraan operasional, menyediakan penampungan darurat serta mengatur mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan agar bantuan bisa tersalurkan secara merata.

Pemenuhan kebutuhan dasar harus berorientasi pada pengurangan risiko bencana, meminimalkan konflik dan memprioritaskan kelompok rentan, serta *gender sensitivity* (perempuan, bayi, anak-anak, lansia, cacat, orang sakit). Selain itu, dalam mendata kebutuhan, harus memperhatikan dan menghitung kebutuhan seluruh personil yang terlibat dalam operasi penanganan darurat sesuai dengan asumsi jumlah kebutuhan personil dari evaluasi harian.

### B. SASARAN

1. Terpenuhinya dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana
2. Tersedianya personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerimaan dan penyaluran bantuan
3. Tersedianya mekanisme kerja yang baik, teratur dan terarah, yaitu tersedianya pemetaan kebutuhan dan penyaluran bantuan yang cepat dan tepat sasaran
4. Terdatanya jumlah, jenis, dan sumber bantuan yang diterima oleh instansi/ SKPD/ sektor dan pihak lainnya
5. Terpenuhinya dan tersalurkannya kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi masyarakat diwilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan

6. Terselenggaranya pengawasan, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sesuai dengan prosedur yang disepakati dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
7. Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinergisitas antar sektor dalam penanganan tanggap darurat

### C. KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar antara lain:

**Tabel 24.** Kegiatan Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Kegiatan	Pelaku/ Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Berakhir	Durasi Pelaksanaan
1.	Terlibat sebagai anggota Tim Kajian Cepat yang dikoordinir oleh Pusdalops BPBD dan Damkar	BPBD dan Damkar, TNI, POLRI, Dinsosnaker, Dinas, Kesehatan, Dishub, Dinas PU, RAPI, ORARI, PMI, , Kecamatan, Kelurahan, RW, RT	BPBD dan Damkar	1-6 Jam setelah keadaan dinyatakan aman dan bisa dilanjutkan sesuai kebutuhan pelaksanaan tanggap darurat bencana	1x24 jam setelah kajian cepat dijalankan. Laporan pertama masuk setelah max 30 jam setelah keadaan dinyatakan aman	1-2 hari
2.	Melakukan koordinasi pos sektor logistik penerimaan dan penyaluran bantuan	BPBD dan Damkar Kota Padang, Dinsosnaker, TNI, POLRI, Bagian perekonomian, Badan Pertanahan, Kantor Ketahanan pangan, Satpol PP, Tagana, Pramuka Peduli, BPPOM, DKK, DPKA, Camat, Lurah, Swasta/BUMN/BUMD, PKK, LSM (KOGAMI, Lumbung Derma, dll)	Koordinator Seksi (Dinsosnaker)	Segera setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari

No	Kegiatan	Pelaku/ Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Berakhir	Durasi Pelaksanaan
3.	Melakukan koordinasi dengan klaster lainnya dalam rangka merekapitulasi data kebutuhan logistik serta pendistribusian bantuan	Koordinator tiap sektor ; BPBD dan Damkar, BASARNAS, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan	Dinsosnaker dan BPBD dan Damkar	Segera setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
4.	Inventarisasi dan klasifikasi bantuan berdasarkan pemetaan kebutuhan kecamatan terdampak	Dinsosnaker dan BPBD dan Damkar	Dinsosnaker	max 1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
5.	Menyediakan gudang untuk penerimaan bantuan	Dinsosnaker, TNI, Swasta, BUMN/BUMD	Dinsosnaker, BPBD dan Damkar	Segera setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
6.	Menyediakan personil sesuai dengan kebutuhan logistik, penerimaan dan penyaluran bantuan	BPBD dan Damkar, Dinsosnaker, Dinas PU, Dishub, TNI, Polri, Swasta/BUMN/BUMD	Dinsosnaker, BPBD dan Damkar	max 1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
7.	Menyediakan tempat penampungan darurat	BPBD dan Damkar Kota Padang, Dinsosnaker, TNI, POLRI, Dinas Pendidikan, Badan Pertanahan, Satpol PP, Camat, Lurah, Swasta/BUMN/BUMD, PMI, LSM	BPBD dan Damkar, TNI	0-24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	3x24 jam	3 hari
8.	Menugaskan personil yang tersedia sesuai dengan tugas masing-masing	BPBD dan Damkar Kota Padang, Dinsosnaker, TNI, POLRI, Satpol PP, Tagana, DKK, Camat, Lurah, Swasta/BUMN/BUMD, PKK, PMI, LSM	Dinsosnaker, BPBD dan Damkar	max 6 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari



No	Kegiatan	Pelaku/ Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Berakhir	Durasi Pelaksanaan
9.	Mendirikan kegiatan dapur umum di tempat pengungsian	BPBD dan Damkar Kota Padang, Dinsosnaker, TNI, POLRI, Satpol PP, Tagana, DKK, Camat, Lurah, Swasta/BUMN/BUMD, PKK, PMI, Relawan	Dinsosnaker, BPBD dan Damkar	max 6 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
10.	Menyediakan dan mengorganisir relawan dalam penyaluran bantuan dan dapur umum	Dinsosnaker, BPBD dan Damkar	Dinsosnaker			
11.	Melakukan pemeriksaan bantuan yang diterima sebelum didistribusikan		BPPOM, DKK	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
12.	Memenuhi dan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sandang, pangan, non pangan kepada masyarakat secara tepat cepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan	BPBD dan Damkar Kota Padang, Dinsosnaker, TNI, POLRI, Satpol PP, Bagian perekonomian, Tagana, Pramuka Peduli, Camat, Lurah, Swasta/BUMN/BUMD, PKK, LSM (KOGAMI, Lumbung Derma, dll), Relawan	BPBD, Dinsosnaker	max 6 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
13.	Menjamin keamanan proses penyaluran bantuan	POLRI, TNI, Satpol PP, BPBD dan Damkar, Dinsosnaker	POLRI, Satpol PP	max 6 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
14.	Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan penyaluran bantuan agar tepat sasaran	Dinsosnaker, BPBD dan Damkar, DPKA, BPKD, LSM (Lumbung Derma, dll)	Dinsosnaker, Lumbung Derma	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
15.	Membuat catatan/dokumentasi kronologis penyaluran bantuan kepada	BPBD dan Damkar, Dinsosnaker	BPBD dan Damkar	1x24 jam setelah rencana operasi	pada saat masa tanggap darurat	90 hari

No	Kegiatan	Pelaku/ Instansi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Berakhir	Durasi Pelaksanaan
	korban bencana/masyarakat di lokasi bencana			ditetapkan	berakhir	
16.	Melakukan pencatatan bantuan berupa uang oleh pihak keuangan (bank) yang terkait	BPBD dan Damkar, Dinsosnaker, DPKA, BPKD	DPKA	7 hari setelah rencana operasi ditetapkan, dilakukan 1 kali dalam 7 hari	pada saat masa tanggap darurat berakhir	12 hari
17.	Menyelenggarakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan	BPBD dan Damkar, Dinsosnaker, TNI, POLRI, Camat, Kelurahan	Dinsosnaker, BPBD dan Damkar	Segera setelah rencana operasi ditetapkan	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari
18.	Melakukan pelaporan secara tertulis kepada Kepala Bidang Operasi dan memutakhirkan informasi sektor kepada Posko Tanggap Darurat dan Posko Lapangan	Koordinator sektor	Dinsosnaker	Pada saat rapat evaluasi atau setiap kali diminta	pada saat masa tanggap darurat berakhir	90 hari

#### D. STANDAR MINIMAL

##### 1. Bantuan Pangan

- Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
- Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
- Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

##### 2. Bantuan Non-Pangan

- Peralatan memasak dan makan
- Kompor, bahan bakar, dan penerangan
- Alat-alat dan perkakas

### 3. Bantuan Sandang

- Perlengkapan pribadi
- Kebersihan pribadi

### 4. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

- Bantuan air bersih
  - Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
  - Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan risiko kesehatan.
- Bantuan Sanitasi
  - Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
  - Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
  - Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
  - Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
  - Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga
  - Tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
  - Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

## E. KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan kebutuhan biaya untuk sektor ini sebesar **Rp. 396.635.660.200,-** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Proyeksi kebutuhan untuk Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar dapat dilihat pada tabel 25.

**Tabel 25.** Kebutuhan Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1.	Relawan	30 /posko/hari	83	1	2490	3790	KSB (2080), TAGANA (250), PMI (500), Pramuka Peduli (150), TNI/POLRI (700), SATPOL PP (100), ORARI (100), RAPI (160), MAPALA Kota Padang (100)	1300		KURANG	50.000	189.500.000
2.	Kendaraan roda 4	2	11	1	22	42	POLRI (40) , Dishub 9	0		CUKUP		
3.	BBM	10 liter	40	90	36000	0		-36000	BELI	KURANG	4500	- 162.000.000
4.	Minyak Tanah untuk dapur umum	10 l/pos/hari	110	90	99000	0	0	-99000	BELI	KURANG	4000	- 396.000.000
5.	Tenda Pengungsian	10933	1	1	10933	20	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD	-10913	BANTUAN	KURANG		0
6.	Tenda dapur umum	656	1	1	656	20	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD	-636	BANTUAN	KURANG		0
7.	ATK	18	1	1	18	0		-18	BELI	KURANG	200000	-3600000
8.	genset	1	15	1	15	0		-15	BANTUAN	KURANG	12000000	0

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
9.	komputer/Laptop	1	5	1	5	20		15		CUKUP (15)		0
10.	Printer	1	5	1	5	45		40		CUKUP (40)		0
11.	HT	1	110	1	110	11				CUKUP		0
12.	Faksimili	1	12	1	12							
13.	Peralatan dapur umum (1 paket)	1	104	90	9360	5		-9355		KURANG		
14.	Beras	4	32000	12	1536000	100000		-1436000		KURANG	1000	-1436000000
15.	Lauk Pauk	2	32000	30	1920000	0		-1920000		KURANG	8000	-15360000000
16.	Pakaian	3	328003	1	984009	0		-984009		KURANG	50000	-49200450000
17.	Minyak Goreng	2	82001	12	1968024	0		-1968024		KURANG	12000	-23616288000
18.	Minyak Tanah	1	82001	90	7380090	0		-7380090		KURANG	7500	-55350675000
19.	Tikar	2	82001	1	164002	0		-164002		KURANG	25000	-4100050000
20.	Selimut	1	328003	1	328003	0		-328003		KURANG	25000	-8200075000
21.	Famili Kit	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	130000	-10660130000
22.	Food ware	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	200000	-16400200000
23.	Kid ware	1	32800	1	32800	0		-32800		KURANG	20000	-656000000
24.	Pembalut wanita	1	164002	1	164002	0		-164002		KURANG	500	-82001000
25.	Pampers lansia	1	32800	1	32800	0		-32800		KURANG	5000	-164000000
26.	Gula	1	82001	12	984012	0		-984012		KURANG	15000	-14760180000
27.	Teh	1	82001	12	984012	0		-984012		KURANG	4000	-3936048000
28.	Kopi	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	60000	-4920060000
29.	Ember	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	20000	-1640020000

No	KEBUTUHAN	STANDAR	VOL KBTHN	JANGKA WAKTU	JML KBTHN	TERSEDIA	LOKASI PERSEDIAAN	KESENJANGAN	KET	RASIO	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
30.	Kain Sarung	1	328003	1	328003	0		-328003		KURANG	50000	-16400150000
31.	Jerigen Plastik	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	10000	-820010000
32.	Mie Instant	1	82001	10	820010	0		-820010		KURANG	1500	-1230015000
33.	Telur	1	328003	12	3936036	0		-3936036		KURANG	1200	-4723243200
34.	Sarden	1	82001	12	984012	0		-984012		KURANG	10000	-9840120000
35.	Baskom	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	10000	-820010000
36.	Pisau	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	5000	-410005000
37.	Kompor	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	100000	-8200100000
38.	Lilin	1	82001	90	7380090	0		-7380090		KURANG	5000	-36900450000
39.	Seragam Sekolah	2	164002	1	328004	0		-328004		KURANG	300000	-98401200000
40.	Alas kaki (sandal/ sepatu)	1	328003	1	328003	0		-328003		KURANG	10000	-3280030000
41.	Pakaian perlengkapan ibadah	1	82001	1	82001	0		-82001		KURANG	50000	-4100050000
42.	Kruk (penyangga utk korban cacat)	1	3280	1	3280	0		-3280		KURANG	200000	-656000000
<b>Total</b>												<b>-Rp 396.635.660.200</b>

## REKAPITULASI KEBUTUHAN

Jika terjadi bencana tsunami dengan skenario gempa 8,9 SR seperti dijelaskan pada BAB 2, maka dana atau anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp. **562.149.105.200,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu, Dua Ratus Rupiah)** seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 26. Rekapitulasi Kebutuhan

NO	SEKSI	SATUAN	KEBUTUHAN
1.	Manajemen dan Koordinasi	Rupiah	862.390.000
2.	Evakuasi dan SAR	Rupiah	3.537.700.000
3.	Kesehatan	Rupiah	52.743.500.000
4.	Komunikasi, Transportasi dan Distribusi	Rupiah	614.125.000
5.	Pemulihan Sarana dan Prasarana	Rupiah	107.755.730.000
6.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Rupiah	396.635.660.200
<b>JUMLAH</b>			<b>562.149.105.200</b>

# 7

## RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi rencana kontinjensi dan prosedur operasi standar (SOP) kepada SKPD/Instansi/Lembaga terkait
2. Meningkatkan kesiapsiagaan pada masa yang akan datang dengan cara mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam rencana pembangunan daerah:
  - Melakukan dan melanjutkan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang kesiapsiagaan kepada masyarakat untuk mendukung respon peringatan dini, terutama bagi masyarakat pinggir pantai
  - Mengimplementasikan kurikulum lokal tentang kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dan kampus terutama di sekolah dan kampus yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami
  - Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana
  - Membangun sistem informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bencana bisa terus dikawal dan berkelanjutan
  - Memperkuat sistem peringatan dini melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS)
  - Mengadakan latihan kesiapsiagaan secara rutin setiap tahun; *table top exercise*, gladi posko dan gladi lapang.
  - Melakukan koordinasi atas bangunan yang memiliki fasilitas helipad untuk dapat dimanfaatkan pada saat terjadi bencana.
  - Membangun gudang penampungan di tempat-tempat ketinggian yang dianggap aman dari ancaman bencana tsunami dalam rangka mengamankan stok pangan, obat-obatan, bantuan untuk korban bencana.
  - Menerapkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memperhatikan :
    - Posisi bangunan



- Lokasi bangunan
  - Konstruksi bangunan tahan gempa
  - Jarak lantai bangunan
  - Tata ruang Kota
  - Dan lain-lain
- Menyediakan infrastruktur pendukung evakuasi bagi masyarakat seperti : jalan evakuasi, shelter, bukit buatan dan lain-lain
  - Menentukan lokasi-lokasi sebagai tempat relokasi masyarakat sementara waktu melaksanakan evakuasi ke daerah aman
  - Menghilangkan/meniadakan gangguan/halangan yang pada jalur evakuasi seperti papan reklame di tengah jalan
  - Membuat peraturan bagi pemilik bangunan tinggi untuk membuka akses bagi masyarakat sebagai tempat evakuasi vertikal
3. Mengalokasikan dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana tak terduga dalam Anggaran Belanja (APBD) dan Pendapatan Daerah dan menyiapkan mekanisme pengelolaannya
  4. Membuat aturan dan mekanisme agar masyarakat korban bencana yang memperoleh bantuan tidak dikenakan pajak.
  5. Membebaskan biaya operasional pada saat tanggap darurat bencana melalui pemanfaatan dana SKPD terlebih dahulu, yang kemudian dilaksanakan penggantian melalui BPBD dan Damkar.



## **PENUTUP**

Demikian Rencana Kontinjensi ini dibuat sebagai bahan masukan bagi Bapak Walikota Padang untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Jumlah anggaran biaya yang ditimbulkan dari beberapa Sektor dalam penanganan bencana bukanlah sebagai Daftar Isian Kegiatan tetapi adalah Proyeksi Kebutuhan apabila terjadi bencana. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, instansi-instansi vertikal, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, relawan dan lain-lain.

Kami menyadari bahwa rencana kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan review secara berkala untuk mengaktualkan data yang ada .

**Padang, Januari 2013**

# LAMPIRAN

**Lampiran 1.****PARAMETER PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA**

Dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi, perlu diambil beberapa kebijakan agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas serta infrastruktur dapat dipulihkan fungsinya. Sehingga semua masyarakat dapat beraktifitas kembali. Namun karena belum ada ketetapan pemerintah (Peraturan Presiden) dalam hal kebijakan lama masa tanggap darurat bencana dan pengakhiran status darurat bencana, maka dalam rencana kontinjensi ini telah disusun parameter untuk pengakhiran status darurat bencana, seperti pada Tabel 27 di bawah ini:

**Tabel 27.** Parameter Pengakhiran Status Darurat Bencana

No.	Aspek/Unsur yang Terkena Dampak	Parameter
1.	<b>KEHIDUPAN</b>	
	Masyarakat/ penduduk	Seluruh jenazah yang ditemukan sudah dimakamkan
		Pencarian korban sudah dihentikan (melalui prosedur operasi SAR)
		Kebutuhan dasar sudah bisa dipenuhi (berdasarkan Perka BNPB No. 7/2008)
		Sudah tersedia huntara
2.	<b>FASILITAS KRITIS</b>	
	Jalan dan jembatan	Jalan dan jembatan menuju dan pada lokasi bencana sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat (4)
	Jaringan listrik	Pulihnya pasokan listrik untuk sarana dan prasarana minimal untuk fasilitas pelayanan publik dan aktifitas perekonomian (objek vital dan proyek vital); rumah sakit, gedung pemerintah, pos darurat, tempat pengungsian)
	Jaringan air bersih dan sanitasi	Pulihnya pasokan air bersih dan sanitasi minimal untuk korban bencana
	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pasokan BBM untuk penanggulangan bencana terpenuhi
	Sarana pelayanan kesehatan	Pertolongan darurat untuk korban sudah dilakukan
		Sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya telah aktif di tiap kecamatan (baik pos darurat ataupun puskesmas)
	Saluran komunikasi	Jaringan komunikasi institusi pemerintah dan pelayanan publik sudah pulih
		Jaringan komunikasi sebagian provider sudah pulih
		Komunikasi antar pos tanggap darurat bencana kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan BNPB sudah lancar
	Bandara	Terlaksananya Penyaluran bantuan melalui udara
	Pelabuhan	Terlaksananya Penyaluran bantuan melalui laut
3.	<b>FASILITAS UMUM</b>	
	Kantor pemerintahan	Aktifitas pemerintahan telah berjalan dengan baik
		Layanan publik telah membaik
	Pasar tradisional	Pasokan kebutuhan pokok telah mulai lancar
		Aktifitas jual beli telah mulai lancar
	Sekolah	Telah tersedia sekolah-sekolah darurat
		Aktifitas belajar mengajar sudah mulai dilakukan

## Lampiran 2.

### LOKASI POSKO LAPANGAN DAN RUMAH SAKIT DARURAT

Lokasi Posko Tanggap Darurat : Kantor BPBD dan Damkar by pass

Lokasi Posko Lapangan :

1. Kecamatan Bungus di Bukit Lampu
2. Kecamatan Lubeg di Kampus UPI
3. Kecamatan Padang Selatan di Kantor Camat
4. Kecamatan Padang Barat di Lapangan PJKA Sawahan
5. Kecamatan Padang Utara di PDAM Gn. Pangilun
6. Kecamatan Padang Timur di Lapangan PJKA Sawahan
7. Kecamatan Nanggalo di Kampus Poltekes Kemenkes Pd. Kopi
8. Kecamatan Koto Tengah di Stasiun TVRI
9. Kecamatan Kuranji di Kantor Camat Kuranji
10. Kecamatan Lubuk Kilangan di kantor Camat Lubuk Kilangan
11. Kecamatan Pauh di Kantor Camat Pauh

Rumah Sakit yang diaktifkan sebagai RS Rujukan:

- RSUD Dr. Rasidin                      RS Asri - Anduring
- RS. Semen Padang by pass             RS Fitria
- RS Siti Rahmah                            RSB Cicik
- RSB Mitra Medika – by pass
- RSB BKM - Sawahan
- RSJ Prof. HB. Saanin
- RS Ibnu Sina
- RS Siti Hawa
- RSUP M. Jamil

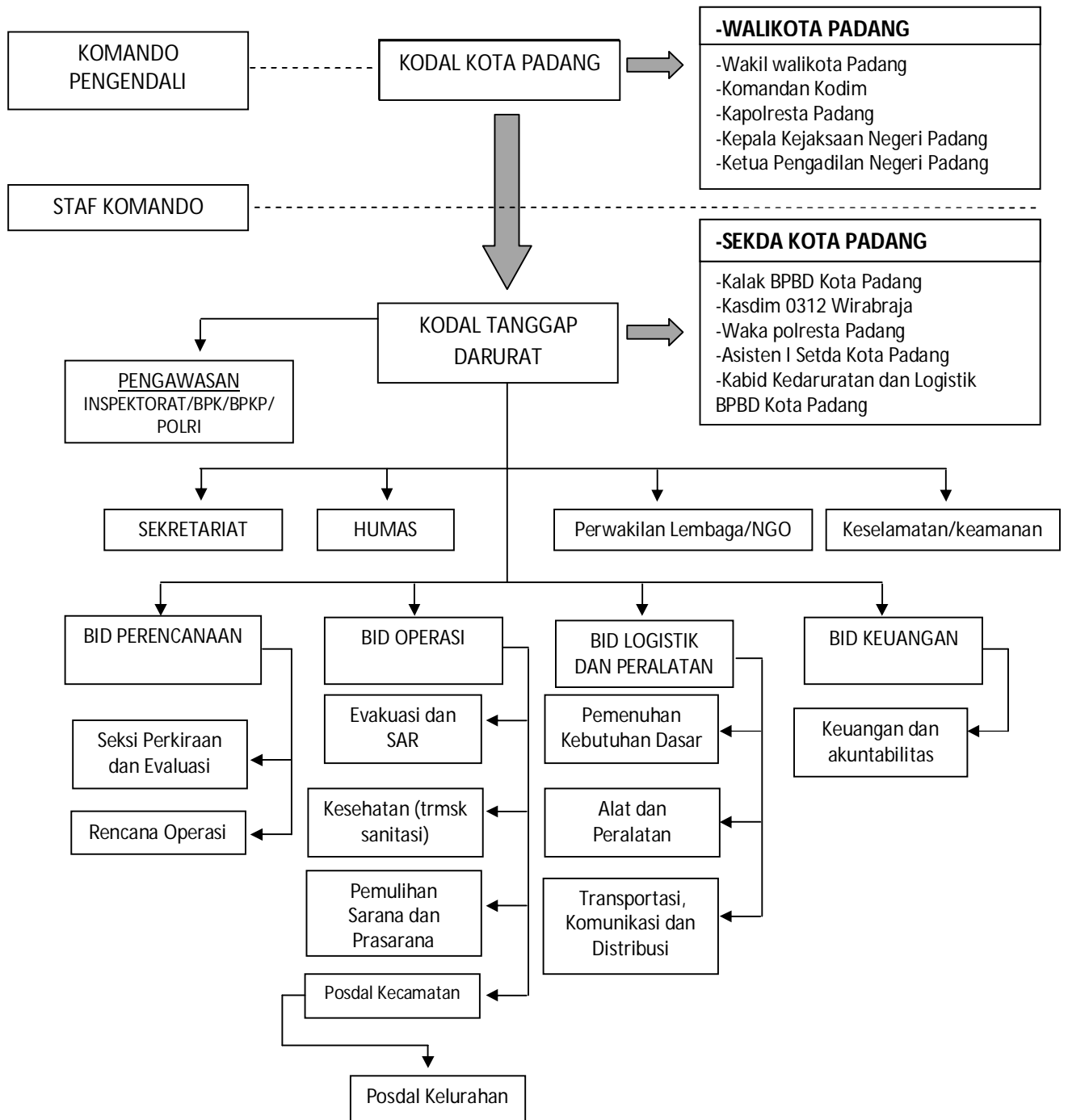
Puskesmas

- Puskesmas Kec. Kuranji 2 buah (Ambacang, Kuranji, Belimbing)
- Puskesmas kec Lubuk. Kilangan 1 buah
- Puskesmas Kec Pauh 1 buah
- Puskesmas Kec Koto Tengah 2 buah (Air Dingin, Ikur Koto)
- Puskesmas Kec. Lubeg : Pegambiran (1)
- Pd. Timur : Puskesmas Andalas

Lokasi Pendirian Rumah Sakit Lapangan di rencanakan di:

- RS Terapung (TNI AL) – Teluk Bayur
- Diklat BRI Pasar Baru
- Gedung Serba Guna PT. Semen Padang
- Ex. Sumatex Subur - Cengkeh

**Lampiran 3.**  
**STRUKTUR KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA KOTA PADANG**



# **PROFIL INSTANSI KELOMPOK KERJA(POKJA)**

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

<b>1. NAMA LEMBAGA</b>	BPBD DAN DAMKAR KOTA PADANG
<b>2. ALAMAT/ NO.TELP/ FAX/EMAIL</b>	JL. RASUNA SAID NO 56 (0751) 28556
<b>3. KONTAK PERSON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drs. DEDI HENIDAL</li> <li>• ANTONI BENDRAS</li> <li>• NURUL WIDYA SISKI, SH, M.SI</li> <li>• SUWONDO</li> <li>•</li> </ul>
<b>4. JABATAN NO.TELP/HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KALAK BPBD KOTA PADANG</li> <li>• KASI KESIAPSIAGAAN 0811667887</li> <li>• PLH.KASI PENCEGAHAN-BPBD 085274646788</li> <li>• STAF KESIAPSIAGAAN 081374777999</li> </ul>
<b>5. TUGAS POKOK &amp; FUNGSI</b>	KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DAN BERPERAN DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA
<b>6. TUGAS YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI INI</b>	MELAKUKAN KOMANDO DAN KOORDINASI UNTUK PEMBAGIAN TUGAS SEMUA SEKSI
<b>7. WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
<b>8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PERSONIL</b></li> <li>- <b>PRASARANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GEDUNG KANTOR BPBD.DAN DAMKAR</li> <li>• GEDUNG PUSDALOPS – PB</li> </ul> </li> <li>- <b>SARANA</b> MOBIL RESCUE, MOBIL AMBULANCE, MOBIL DAPUR UMUM, DLL</li> </ul>
<b>9. KEMAMPUAN LAIN</b>	



**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	BASARNAS KANTOR SAR PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>KONTAK PERSON</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. BY PASS KM 25 ANAK AIA 0751 484534
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	JASRIL (081365660207)
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	KASI OPERASI 08117524005
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	MENCARI DAN MENOLONG KORBAN MANUSIA DAN BENTUK TINDAKAN YANG DIANGGAP BERGUNA BAGI NEGARA
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	EVAKUASI
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	PROVINSI SUMBAR
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. TEAM RESCUER YANG SUDAH TERLATIH SEBANYAK 60 ORANG 2. PERALATAN EVAKUASI UNTUK DARAT-LAUT
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

<b>1. NAMA LEMBAGA</b>	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA PADANG
<b>2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL</b>	JL. TERANDAM III NO. 27 B PADANG TIMUR (0751) 7876151 / (0751) 33624 <a href="mailto:palangmerahindonesia.padang@yahoo.com">palangmerahindonesia.padang@yahoo.com</a>
<b>3. KONTAK PERSON</b>	RAMLI PARMA NOFITRI YARDI
<b>4. JABATAN NO.TELP/HP</b>	WAKIL BIDANG YANKESSOS/ SEKRETARIS 08126719616  KEPALA MARKAS PMI KOTA PADANG 085263128784
<b>5. TUGAS POKOK &amp; FUNGSI</b>	a. KOORDINATOR KEGIATAN PMI KOTA PADANG
<b>6. TUGAS YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI INI</b>	a. SEKSI EVAKUASI DAN SAR b. SEKSI KESEHATAN
<b>7. WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
<b>8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	
<b>9. KEMAMPUAN LAIN</b>	a. MANAJER PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT b. LOGISTIK

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

<b>1. NAMA LEMBAGA</b>	DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
<b>2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL</b>	JL. KESEHATAN DADOK TUNGGUL HITAM (0751) 463905/ (0751) 463904
<b>3. KONTAK PERSON</b>	NELFRIDES
<b>4. JABATAN NO.TELP/HP</b>	STAF PENANGGULANGAN WABAH DAN BENCANA 08126624252
<b>5. TUGAS POKOK &amp; FUNGSI</b>	a. SURVEILANS b. PENANGGULANGAN BENCANA
<b>6. TUGAS YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI INI</b>	SEKSI KESEHATAN
<b>7. WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
<b>8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	- PUSKESMAS 22 BUAH - PUSTU 58 BUAH - RUMAH SAKIT 27 BUAH - POSYANDU 822 BUAH - PUSKESKEL 29 BUAH - SEKOLAH DAN PT 962 BUAH - KADER KESEHATAN 3000 BUAH
<b>9. KEMAMPUAN LAIN</b>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	KODIM-0312 PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. M.H THAMRIN NO. 5 0751-34362 <a href="mailto:kodimpadang0312@yahoo.com">kodimpadang0312@yahoo.com</a>
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	KAPTEN INF SUCIPTO NRP
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	PASI OPS DIM 0312-KOMANDAN DISTRIK MILITER 032 08126756799
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERITORIAL
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	BANTUAN PERKUATAN PERSONIL KEPADA PEMKO PADANG DALAM KEGIATAN KEMANUSIAAN SAAT TANGGAP DARURAT, PASCA DAN REHAB REKON PASCA BENCANA
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. MEMONITORING WILAYAH SETIAP SAAT 2. PENGENDALIAN PERSONIL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 3. MELAKSANAKAN KOMSOS DIBUIL 4. MEMBERIKAN MASUKAN YANG MEMBANGUN UNTUK KOTA PADANG 5. PEMBERDAYAKAN PERSONIL DI LAPANGAN 6. KECEPATAN DALAM MELAKSANAKAN DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	DAPAT DIGERAKKAN PADA SAAT KAPAN KEADAAN DAN DIMANA MEDAN.

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>KONTAK PERSON</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. M YAMIN. NO.70 PADANG
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	ERNAWATI, B.SC
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	KASI POSTEL 08136395444
5.	<b>TUGAS POKOK</b> <b>INSTANSI</b>	MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SERTA TUGAS PEMBANTUAN
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	SEKTOR TRANSPORTASI DAN INFORMASI
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	SATPOL PP KOTA PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. BAGINDO AZIZ CHAN NO.8 A PADANG
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	RINALDI KASIM
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	PENATA TK I -SATPOL PP KOTA PADANG 08126626975
5.	<b>TUGAS POKOK</b> <b>INSTANSI</b>	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERWAKO DAN KEPUTUSAN WALIKOTA
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	BANTUAN PERSONIL UNTUK KEAMANAN DALAM PENYALURAN BANTUAN KEPADA KORBAN GEMPA BUMI BERSAMA TNI DAN POLRI
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. MENGGERAKAN PERSONIL 2. MENGHITUNG RENCANA ANGGARAN BIAYA 3. MELAKSANAKAN DAN MONITORING DAN EVALUASI 4. MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN 5. MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS ADMINTRASI
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	MAMPU BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	ORARI LOKAL PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	KOMP. GOR H. AGUS SALIM PADANG
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	ZAINIL ERIZON
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	WK KETUA 08126701136
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	BANTUAN / DUKUNGAN KOMUNIKASI
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	DUKUNGAN KOMUNIKASI
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. PROGRAM RADIO & REAKSI CEPAT MENDIRIKAN STATION RADIO 2. OPERASI PROSEDUR KOMUNIKASI RADIO
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	KOMUNIKASI SE-NUSANTARA & LUAR NEGERI

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	PDAM KOTA PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. H. AGUS SALIM NO.10 PADANG 0751- 22789
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	REDY FIKARLO, ST
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	KASUBAG ANALISA JARINGAN & GIS- PDAM 085274222122
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	PENYEDIAAN FASILITAS SARANA AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. IPA 8 UNIT 2. SUMUR BOR 6 UNIT 3. MOBIL TANKI 4 UNIT 4. SDM
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	



**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	DINAS PU KOTA PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. UJUNG GURUN NO.2 PADANG 0751-21414/ 0751- 21414 yosheaulia@yahoo.com
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	YOSHE AULIA,ST,MT
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	KASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN BIDANG BINA PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG 081363828278
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	PENGENDALIAN, MEMONITORING, EVALUASI KEGIATAN
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI</b>	KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASANA DARURAT
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. EXCAVATOR 2. BACHOE LOADER 3. MESIN GILAS 4. VIBRA ROLLES 5. TAN DEM 6. SPRAYER 7. STANPER
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	POLRESTA PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. M YAMIN SH NO. 1 0751 812963 poskooperasi_resra padang@yahoo.co.id
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	IPTU INDRA, SH
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	KASUBAG DAL OPS BAG OPS RESTA PADANG 081374668522
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	MENGENDALIKAN PELAKSANAAN OPERASI BAIK PENGAMANAN MAKO MAUPUN PENGAMANAN DILUAR MAKO
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	SEBAGAI PENGENDALIAN PERSONIL POLRESTA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BENCANA ALAM
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG (WILKUM POLRESTA PADANG)
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. KEMAMPUAN SAR 2. MELAKUKAN, PENGENDALIAN PERSONIL DI DAERAH BENCANA
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PADANG
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. RASUNA SAID NO 73 PADANG DAN JALAN DELIMA NO. 5 PADANG 0751 21536 / 0751 21903
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	DRS. AZWIR DAN MIRAL MASYRI
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	STAF BANJAMSOS DAN KABID BANJAMSOS 08126730879 DAN 085374143688
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	PENYALURAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL DISOSNAKER
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	SEKTOR LOGISTIK
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. RASUNA SAID NO 56 0751 28556
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	EDDY ASRI
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	KABID DAMKAR PADANG 08126611164
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	PEMADAMAN KEBAKARAN
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI</b>	
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	KOTA PADANG
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. FIRE COMANDO 2. FIRE RESCURE
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	FT-UNAND (PSB- UNAND)
2.	<b>ALAMAT</b>  <b>NO. TELP/FAX</b>  <b>E-MAIL</b>	KAMPUS UNAND LIMAU MANIS
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	Dr. BAMBANG ISTIYONO, ME
4.	<b>JABATAN</b>  <b>NO. TELP/HP</b>	Pembina Utama IV- Pusat Studi Bencana Unand  0811664421
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	STUDI BENCANA ALAM, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI SEKTOR TRANSPORTASI DAN KOMINFO
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>	
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	1. MS OFFICE  2. AHLI MANAJEMEN BENCANA
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	<b>NAMA LEMBAGA</b>	RSUD Dr. RASIDIN PADANG																		
2.	<b>ALAMAT</b> <b>NO. TELP/FAX</b> <b>E-MAIL</b>	JLN. AIR PAKU SEI SAPIH PADANG 0751 499158																		
3.	<b>KONTAK PERSON</b>	ALFITRI ITA KUSMAYANTI,SKM																		
4.	<b>JABATAN</b> <b>NO. TELP/HP</b>	KASI PENUNJANG MEDIK 081267076933																		
5.	<b>TUGAS POKOK INSTANSI</b>	MELAYANI KORBAN YANG TEREVAKUASI DAN YANG DATANG KE RUMAH SAKIT																		
6.	<b>TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI</b>	MEMBANTU DKK UNTUK MEBUAT RENCANA KONTIJENSI SEKTOR KESEHATAN																		
7.	<b>WILAYAH CAKUPAN</b>																			
8.	<b>KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. DOKTER UMUM</td> <td style="text-align: right;">21 ORANG</td> </tr> <tr> <td>2. DOKTER SPESIALIS</td> <td style="text-align: right;">12 ORANG</td> </tr> <tr> <td>3. PERAWAT DAN BIDAN</td> <td style="text-align: right;">120 ORANG</td> </tr> <tr> <td>4. PENYULUH</td> <td style="text-align: right;">5 ORANG</td> </tr> <tr> <td>5. GIZI</td> <td style="text-align: right;">16 ORANG</td> </tr> <tr> <td>6. LABOR</td> <td style="text-align: right;">12 ORANG</td> </tr> <tr> <td>7. RONTGEN</td> <td style="text-align: right;">6 ORANG</td> </tr> <tr> <td>8. SUPIR AMBULANCE</td> <td style="text-align: right;">6 ORANG</td> </tr> <tr> <td>9. PERALATAN KESEHATAN</td> <td></td> </tr> </table>	1. DOKTER UMUM	21 ORANG	2. DOKTER SPESIALIS	12 ORANG	3. PERAWAT DAN BIDAN	120 ORANG	4. PENYULUH	5 ORANG	5. GIZI	16 ORANG	6. LABOR	12 ORANG	7. RONTGEN	6 ORANG	8. SUPIR AMBULANCE	6 ORANG	9. PERALATAN KESEHATAN	
1. DOKTER UMUM	21 ORANG																			
2. DOKTER SPESIALIS	12 ORANG																			
3. PERAWAT DAN BIDAN	120 ORANG																			
4. PENYULUH	5 ORANG																			
5. GIZI	16 ORANG																			
6. LABOR	12 ORANG																			
7. RONTGEN	6 ORANG																			
8. SUPIR AMBULANCE	6 ORANG																			
9. PERALATAN KESEHATAN																				
9.	<b>KEMAMPUAN LAIN</b>																			

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	LUMBUNG DERMA
2.	ALAMAT  NO. TELP/FAX  E-MAIL	WALHI SUMBAR/LP2M
3.	KONTAK PERSON	PUJI WAHYU MULYANI
4.	JABATAN  NO. TELP/HP	STAF LP2M  085263140422
5.	TUGAS POKOK INSTANSI	PENGUATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BASIS
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI	1. SEKTOR MANAJEMEN & KOORDINASI  2. SEKTOR LOGISTIK PENERIMAAN & PENYALURAN BANTUAN
7.	WILAYAH CAKUPAN	SUMBAR
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	RELAWAN
9.	KEMAMPUAN LAIN	PENERIMAAN & PENYALURAN BANTUAN

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

1	NAMA LEMBAGA	UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2	ALAMAT NO. TELP/FAX E-MAIL	KAMPUS UNP AIR TAWAR BARAT PADANG LABORATORIUM JURUSAN ISP FIS UNP
3	KONTAK PERSON	ZIKRI ALHADI DAN SISKA SASMITA
4	JABATAN NO. TELP/HP	TIM LABORATORIUM JURUSAN ISP FIS UNP 081374254565 DAN 08122413288
5	TUGAS POKOK INSTANSI	PENELITIAN UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
6	TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI	PERUMUSAN DAN ANALISIS AKADEMIK KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN BENCANA
7	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI DAN KAB/KOTA SE-SUMBAR
8	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	1. DIVISI PENELITIAN 2. DIVISI PENGABDIAN MASYARAKAT 3. ANALISIS KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN BENCANA 4. KAJIAN AKADEMIK PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN BENCANA
9	KEMAMPUAN LAIN	MOBILISASI MAHASISWA UNTUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TERKAIT PENANGANAN BENCANA



**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT  
YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI**

<b>1. NAMA LEMBAGA</b>	KOMUNITAS SIAGA TSUNAMI (KOGAMI)
<b>2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL</b>	JL. BERINGIN UJUNG NO 70 BELANTI LOLONG PADANG
<b>3. KONTAK PERSON</b>	PUTRI LENGGOGENI
<b>4. JABATAN NO.TELP/HP</b>	MANAJER PROGRAM 085363077117
<b>5. TUGAS POKOK &amp; FUNGSI</b>	MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA
<b>6. TUGAS YANG MENYUSUN RENCANA KONTINJENSI INI</b>	a. SEKSI MANAJEMEN DAN KOORDINASI
<b>7. WILAYAH CAKUPAN</b>	PROVINSI SUMATERA BARAT
<b>8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</b>	- <b>PERSONIL</b> TRAINER, FASILITATOR DAN RELAWAN  - <b>SARANA DAN PRASARANA</b> MOTOR TRAIL, HT DLL
<b>9. KEMAMPUAN LAIN</b>	PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN